

info Pasti

MEDIA INFORMASI PENGADAAN DAN ASET TERKINI

INFO PASTI | EDISI XII | 2024

UTILISASI DAN OPTIMALISASI ASET

Utilisasi dan optimalisasi aset Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk mencapai titik keseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan aset.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Cover Story

Utilisasi dan optimalisasi aset eksisting menjadi salah satu prioritas kebijakan yang diutarakan pada *Leaders Offsite Meeting* Kementerian Keuangan pada tahun 2023 terkait penyediaan rumah dinas dan gedung kantor yang laik. Pada cover edisi ini, kami menggunakan Lego sebagai ilustrasi. Lego tersusun dari berbagai *brick-brick* terpisah dan beraneka ragam yang apabila disatukan akan membentuk berbagai bentuk objek yang dapat dijadikan sebagai media hiburan berupa permainan. Lego tersebut kami interpretasikan sebagai sebuah aset eksisting yang apabila diutilisasi dengan baik akan memberikan fungsi dan manfaat yang optimal untuk memenuhi kebutuhan.

Pemilihan warna *navy blue* pada latar belakang cover serta *yellowfish gold* dan *white* pada font didasarkan pada warna yang identik dengan identitas Kementerian Keuangan.

Pemilihan warna pada ribbon (*Cream*, *Orange Sun*, dan *Tangerine*) disesuaikan dengan warna pada identitas Sekretariat Jenderal.

Ilustrasi Sampul oleh

Much Hari Cahyo

DITERBITKAN OLEH

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan

Edy Gunawan

PIMPINAN REDAKSI

Kepala Bagian Manajemen Teknis, Data dan Informasi
Anwar Djunaidi

REDAKTUR PELAKSANA

Kepala Subbagian Kerja Sama dan Komunikasi

Yulia Candra Kusumarini

TIM REDAKSI

Muhammad Ibnu Sujono, Tyta Hanistia Rizkimada
Dwi Citra Lestari, Much Hari Cahyo

REDAKTUR FOTO

Much Hari Cahyo

DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT

Muhammad Ibnu Sujono & Much Hari Cahyo

ALAMAT REDAKSI

Gedung Juanda II Lantai 15,
Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta

KONTAK

Sosial Media

instagram & youtube :@pastikanasetkita
website : www.romadan.kemenkeu.go.id

Saluran Bantuan

Telepon Kementerian Keuangan:
134 (untuk sambungan dalam negeri)
+622123507011 (untuk sambungan luar negeri)

Whatsapp Kementerian Keuangan: +6281310004134

Whatsapp Helpdesk LPSE: +6281283676760

Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Website: www.kemenkeu.go.id

Saluran Pengaduan

Layanan Pengaduan Kementerian Keuangan:

Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id

Website: www.wise.kemenkeu.go.id

Layanan Pengaduan Nasional :

website: www.lapor.go.id

DAFTAR ISI

4 CATATAN PIMPINAN REDAKSI

INFO ASET

- 5 Optimalisasi Gedung Sutikno Slamet dengan Implementasi *Activity Based Workplace* (ABW)
- 7 Kemenkeu Satu : Kolaborasi Efektif Penggunaan Aset Dalam Mewujudkan Efisiensi Kinerja
- 11 Belajar dari Sejong : Inspirasi untuk Ibu Kota Negara baru Indonesia”
- 14 Langkah Lebar Pemenuhan Hunian Pegawai Kemenkeu Satu
- 18 KBLBB : Langkah Kecil Memaknai Transisi Energi
- 21 Pengelolaan BMN : Peranan Utilisasi Optimalisasi BMN
- 24 Mendukung Kemenkeu Membangun Budaya Data Melalui Kelengkapan Data Master Aset
- 27 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN SIMAN V2
- 31 Optimalisasi Kendaraan Dinas Operasional Melalui Aplikasi SI-Kendi
- 33 Transformasi Gedung Kelas Menjadi Asrama : PKN STAN Sulap Aset Negara demi Optimalisasi BMN
- 37 Penataan Kawasan Renon, Bali

INFO PENGADAAN

- 47 Mengurangi Impor Untuk Menguatkan Ekonomi Nasional
- 50 Pentingnya Verifikasi Lapangan : Alamat Palsu Pemenang Tender Proyek Konstruksi
- 53 SIMPeL-NG Terobosan Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

INFO LAIN-LAIN

- 55 Pendidikan Unggul Korea Selatan : Pengalaman Studi dan Tips Beasiswa
- 61 Mari Hidup Sehat: Dengan Gizi Seimbang
- 65 Candi Borobudur : Perpabuan Kultur Spiritual, Edukasi dan Pariwisata
- 67 Meromantisasi Pesona Jawa Timur : Sebagai Wisata Untuk Healing

ANWAR DJUNAIDI

Pimpinan Redaksi

Dalam Leader Offsite Meeting yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 20 Januari 2023, salah satu arahan yang disampaikan oleh pimpinan adalah terkait dengan penyediaan rumah dinas dan gedung kantor yang layak. Hal tersebut nampak pada beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sampai saat ini masih menempati gedung kantor sewa dan belum memiliki rumah dinas. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

Salah satu tindak lanjut atas arahan pimpinan terhadap permasalahan tersebut adalah dilakukannya pemetaan aset yang diimplementasikan dalam kegiatan Penataan Kawasan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan kegiatan pemetaan aset yang telah dilakukan pada tahap awal melalui kegiatan Penataan Kawasan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan di seluruh provinsi, diketahui bahwa dalam satu kawasan provinsi terdapat satuan kerja yang masih memiliki kebutuhan berupa gedung kantor dan/atau rumah negara. Sedangkan, pada waktu yang bersamaan terdapat satuan kerja yang memiliki aset berlebih, baik berupa gedung kantor maupun rumah negara.

Kegiatan penataan kawasan dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik dalam rangka memenuhi kebutuhan barang milik negara (BMN) berupa bangunan gedung kantor dan/atau rumah negara pada satuan kerja dalam suatu kawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kewajaran, efisiensi dan optimalisasi BMN serta penggunaan aset

bersama.

Secara harfiah, optimalisasi BMN merupakan suatu proses mengoptimalkan penggunaan BMN atau proses menjadikan BMN dalam kondisi paling baik. Optimalisasi BMN akan menjadikan BMN dalam penggunaan terbaik (*best use*). Sedangkan, Utilisasi BMN berdasarkan KMK-334/KMK.01/2021 merupakan bentuk optimalisasi BMN pada suatu Unit Eselon I yang tidak sedang menggunakan BMN tersebut, untuk digunakan oleh Unit Eselon I lain yang memerlukan BMN tersebut guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam waktu tertentu.

Berdasarkan definisi dan keadaan tersebut di atas, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai titik keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan aset eksisting adalah dengan melakukan utilisasi dan optimalisasi aset di lingkungan Kementerian Keuangan. Aset yang berlebih dapat dioptimalisasikan untuk pemenuhan kebutuhan pada Satuan Kerja lain dalam satu kawasan yang belum memiliki gedung kantor sendiri dan/atau rumah negara melalui utilisasi penggunaan dan penggunaan aset bersama di lingkungan Kementerian Keuangan.

Akhir kata, diharapkan liputan dan tulisan dalam Majalah Info PASTI ini dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, serta inspirasi bagi para pembaca. Selain itu, mari kita jaga aset kita dengan baik untuk mencapai pengelolaan BMN yang optimal!

Semoga bermanfaat, selamat membaca!





Foto : Dicky/Ruang Kerja LDKPI Lt.19

Optimalisasi Gedung Sutikno Slamet dengan Implementasi *Activity Based Workplace* (ABW)

Ditulis oleh Torkista Suadamara

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 135 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan memiliki tugas dan fungsi terkait Perencanaan Kebutuhan BMN dan Optimalisasi BMN.

Perencanaan kebutuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2020 merupakan siklus awal dari pengelolaan aset, terintegrasi dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang disusun dengan mempertimbangkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan BMN, atas apa yang telah direncanakan juga dapat memberi manfaat yaitu BMN tersebut digunakan secara optimal.

Optimalisasi BMN adalah proses meningkatkan efisiensi dan

efektivitas BMN suatu organisasi, dengan tujuan untuk memastikan BMN dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap tujuan strategis dan operasional organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan merencanakan kebutuhan BMN. Dalam merencanakan kebutuhan BMN, diperlukan analisis data penggunaan dan kinerja BMN untuk mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi.

Optimalisasi BMN membantu organisasi mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa BMN digunakan dengan cara yang paling efektif. Selain itu, dengan strategi yang tepat, optimalisasi aset dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait investasi masa depan dan alokasi sumber daya. Pada artikel ini, kami membahas dampak pengelolaan BMN dalam perencanaan penataan ruang pada gedung kantor Kementerian Keuangan, yaitu gedung Sutikno Slamet.

Gedung Sutikno Slamet digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang terdiri dari total 26 lantai dengan luas total bangunan 40.611m². Bentuk bangunan terdiri dari basement pada lantai terbawah, dan lantai berikutnya terdapat ruang aula dan fasilitas umum lainnya. Untuk lantai yang difungsikan sebagai ruang kerja sebanyak 20 lantai dengan luas per lantai sebesar 2.030m². Perubahan teknologi informasi, budaya kerja dan organisasi yang lebih dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan, menyebabkan kebutuhan atas sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi juga mengalami perubahan, salah satunya perubahan atas kebutuhan ruang kerja.

Ruang kerja yang dimaksud pada artikel ini tidak sebatas hanya berupa ruang untuk bekerja saja, namun juga ruang pendukung lainnya. Perencanaan kebutuhan ruang kerja penting dilakukan demi kenyamanan pegawai dan efisiensi anggaran. Perubahan budaya kerja berdampak pada tata ruang kerja

yang sebelumnya konvensional menjadi *Activity Based Workplace*.

Activity Based Workplace (ABW) yaitu sebuah pendekatan dalam desain ruang kerja yang menekankan penggunaan ruang berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan oleh individu atau tim, bukan berdasarkan pada hirarki atau struktur organisasi tradisional. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung berbagai jenis pekerjaan yang berbeda dan memungkinkan karyawan untuk bekerja secara efisien dan produktif.

ABW berangkat dari konsep penggunaan ruang berdasarkan "*activity setting*" yaitu lingkungan serta atribut teknis dan fisik sebagai pendukung dari berbagai macam performa yang berlangsung di lingkungan kerja (ref. data arsitektur dan Robert Luchetti). Langkah-langkah dalam menerapkan konsep ABW antara lain:

- Pemetaan aktivitas, adalah memahami jenis aktivitas yang dilakukan oleh pegawai dalam organisasi. Mencakup kolaborasi, fokus individu, pertemuan, dan lain-lain.
- Penempatan fasilitas, ruang kerja dapat dirancang sedemikian rupa sehingga ada berbagai

jenis fasilitas yang cocok untuk setiap jenis aktivitas. Misalnya, ruang terbuka untuk kolaborasi, ruang rapat untuk pertemuan, dan ruang yang tenang untuk fokus individu.

- Fleksibilitas, dimana desain ruang haruslah fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ini bisa melibatkan penggunaan meubelair yang dapat dipindahkan atau bahkan dinding yang bisa dilipat untuk membuat ruang yang lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan kebutuhan.
- Penggunaan teknologi yang tepat termasuk peralatan presentasi, koneksi internet yang cepat, dan perangkat lunak kolaborasi yang memungkinkan karyawan untuk bekerja sama secara efisien dari berbagai lokasi.
- Evaluasi dan penyesuaian, penting untuk terus menerus mengevaluasi penggunaan ruang dan mengumpulkan umpan balik dari karyawan untuk memastikan bahwa desain ruang tetap relevan dan efektif.

Dengan implementasi ABW, diharapkan organisasi dapat meningkatkan produktivitas,

kolaborasi, dan kenyamanan pegawai, sehingga akan berdampak positif pada kinerja organisasi.

Setelah implementasi konsep ABW dilakukan pada gedung Sutikno Slamet, luas kebutuhan ruang kerja menjadi lebih kecil dibandingkan kebutuhan ruang kerja konvensional. Terdapat ruang kerja yang kurang optimal jika hanya digunakan DJA, sedangkan masih terdapat Satuan Kerja di UE I lainnya yang masih sewa karena tidak memiliki gedung kantor sendiri.

Kebutuhan ruang kerja untuk Satuan Kerja yang masih sewa, ternyata dapat diakomodir untuk ditempatkan di ruang-ruang hasil optimalisasi dari gedung Sutikno Slamet. Dengan mempertimbangkan faktor efektifitas dan efisiensi ruang kerja, terdapat 3 lantai (total luas $\pm 6.000\text{m}^2$) yang dapat dioptimalisasi untuk digunakan oleh Satuan Kerja yang masih sewa. Dengan implementasi tersebut, beban anggaran untuk sewa gedung menjadi berkurang sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.



Foto : Dicky/Ruang Kerja LDKPI Lt.19

SATU : KOLABORASI EFEKTIF PENGUNAAN ASET DALAM MEWUJUDKAN EFISIENSI KINERJA

Ditulis oleh Gayuh Ardhi Rumpoko



Foto : Andika Eka S./GKN Surabaya 1

Kolaborasi, efektif, dan efisien

Mengutip dari beberapa ahli, kolaborasi menekankan pentingnya kerja sama, komunikasi yang efektif, dan pencapaian tujuan bersama dalam mencapai hasil kolaboratif. Efektif menekankan pada pencapaian tujuan yang diinginkan secara optimal dengan sumber daya yang ada. Sedangkan, efisiensi menekankan mengenai penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kolaborasi efektif dan efisien dapat didefinisikan sebagai proses di mana individu atau kelompok bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang optimal, sederhana, dan tanpa pemborosan sumber daya.

Apa kolaborasi penggunaan aset?

Kolaborasi penggunaan aset merupakan strategi bisnis yang semakin populer dalam mengoptimalkan sumber daya dan mencapai tujuan bersama. Secara

sederhana, kolaborasi penggunaan aset merujuk pada praktik kerja sama antara dua entitas atau lebih yang saling memanfaatkan aset mereka untuk mencapai keuntungan bersama. Aset tersebut bisa berupa berbagai macam hal, mulai dari infrastruktur fisik seperti fasilitas produksi atau kantor hingga sumber daya intelektual seperti teknologi atau keahlian karyawan.

Dalam kolaborasi semacam ini, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya membagi akses terhadap aset-aset tersebut, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan manfaat yang diperoleh dari aset tersebut. Tujuan utama dari kolaborasi penggunaan aset adalah untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya dan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat.

Kapan perlu dilakukan kolaborasi penggunaan aset?

Hal-hal yang menjadi indikator untuk dapat segera

mengimplementasikan kolaborasi penggunaan aset adalah:

1. Terdapat aset yang tidak terpakai secara optimal.
2. Adanya keterbatasan sumber daya.
3. Mengejar keuntungan dari keahlian atau teknologi tertentu.
4. Ketika ingin meningkatkan efisiensi biaya operasional.
5. Adanya tantangan bersama.

Kolaborasi penggunaan aset adalah strategi bisnis yang dapat memberikan sejumlah manfaat, mulai dari pengurangan biaya hingga peningkatan efisiensi dan akses terhadap sumber daya tambahan. Namun, keberhasilan kolaborasi semacam itu tergantung pada pemilihan mitra yang tepat dan perencanaan yang cermat. Dengan mempertimbangkan kapan sebaiknya melakukan kolaborasi penggunaan aset dan bagaimana cara terbaik untuk melaksanakannya, organisasi dapat memanfaatkan strategi ini untuk mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih efektif.

Tujuan dan manfaat Kolaborasi Penggunaan Aset

Strategi kolaborasi penggunaan aset menjadi semakin diperbincangkan banyak pihak sebagai salah satu solusi untuk memaksimalkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mencapai tujuan bersama. Tujuan dari kolaborasi penggunaan aset dalam operasional suatu organisasi adalah untuk menciptakan sinergi yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. Manfaat yang diharapkan dari kolaborasi penggunaan aset adalah:

1. Optimalisasi aset,
2. Efisiensi biaya operasional,
3. Memperluas akses terhadap sumber daya tambahan yang tidak dimiliki,
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi,
5. Meminimalkan risiko.

Bagaimana Cara Kolaborasi Penggunaan Aset?

Langkah awal dalam mengelola kolaborasi penggunaan aset adalah dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan potensi organisasi. Identifikasi aset yang dimiliki organisasi dan identifikasi area-area di mana kolaborasi dapat memberikan nilai tambah. Pertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi untuk menentukan aset mana yang paling cocok untuk berbagi dengan organisasi lain.

Setelah mengevaluasi kebutuhan dan potensi organisasi, langkah berikutnya adalah mencari mitra kolaborasi yang tepat. Pilih mitra yang memiliki kebutuhan yang sejalan dengan aset yang dimiliki oleh organisasi, serta memiliki keahlian atau sumber daya tambahan yang dapat memperkuat kolaborasi. Pastikan mitra tersebut memiliki visi dan nilai yang sejalan dengan perusahaan Anda untuk memastikan keselarasan dalam kemitraan.



Foto: Much Hari Cahyo/KPP Pratama Pondok Aren.

Kemitraan yang kuat adalah kunci kesuksesan dalam kolaborasi penggunaan aset. Organisasi harus berfokus pada pembangunan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati antar organisasi. Komunikasi yang terbuka, transparansi, dan kepercayaan adalah faktor penting dalam membangun kerja sama yang baik. Perlu ada regulasi, kesepahaman, dan kesepakatan yang melandasi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Agar kolaborasi penggunaan aset dapat berjalan lancar, tentukan dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ini termasuk pembagian waktu penggunaan aset, biaya yang akan dibagi, serta proses pengelolaan dan pemeliharaan aset. Hal ini harus didukung oleh regulasi yang tegas dan jelas.

Sistem pengelolaan yang efektif sangat penting dalam mengelola kolaborasi penggunaan aset.

Pastikan untuk memiliki prosedur yang jelas untuk penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan aset bersama. Gunakan teknologi dan sistem informasi yang sesuai untuk memfasilitasi kolaborasi dan memantau kinerja secara efisien.

Tata Kelola dan lingkungan yang senantiasa berubah akan menuntut proses kolaborasi penggunaan aset harus dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Tetap terbuka terhadap perubahan dan fleksibel dalam menyesuaikan strategi kolaborasi sesuai kondisi pasar yang berubah.

Organisasi harus memastikan dan mengevaluasi kinerja kolaborasi penggunaan aset. Identifikasi area-area di organisasi yang belum optimal dan permasalahan yang telah atau berpotensi muncul. Gunakan data dan analisis untuk membuat keputusan yang informasional dan berbasis bukti.



Foto : Heri Keswanto/Rusunara Jayapura

Selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja kolaborasi dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan komitmen, komunikasi yang terbuka, dan kerja sama yang kuat, kolaborasi penggunaan aset dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan peningkatan operasional organisasi dan peningkatan layanan yang dinamis dan kompetitif. Dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat memaksimalkan potensi kolaborasi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

Kolaborasi Penggunaan Aset di lingkungan Kementerian Keuangan

Urgensi penerapan Kolaborasi Penggunaan Aset

Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang besar dengan aset kelolaan yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki satuan kerja dengan berbagai jenis layanan antara lain pelayanan pengelolaan anggaran, pelayanan pengelolaan utang dan pembiayaan, pelayanan perpajakan, pelayanan kepabeanan dan cukai, pelayanan perbendaharaan, pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, pelayanan Pendidikan dan pelatihan keuangan negara, serta layanan lainnya.

Dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut, hal-hal yang menjadi alasan penerapan kolaborasi penggunaan aset, adalah sebagai berikut:

- *Optimalisasi sumber daya.* Kolaborasi memungkinkan berbagai unit kerja untuk berbagi aset, sehingga aset-

aset yang tidak terpakai/ kurang optimal di satu unit bisa digunakan oleh unit lain yang lebih membutuhkan.

- *Efisiensi biaya.* Mengurangi pengeluaran biaya operasional dan pembelian aset baru karena aset yang ada digunakan secara optimal melalui penggunaan bersama.
- *Peningkatan sinergi antar unit.* Kolaborasi penggunaan aset mendorong terjadinya interaksi antar unit, yang dapat membangun hubungan kerja yang lebih solid.
- *Optimalisasi aset* berarti nilai guna aset berada pada titik terbaik, sehingga apabila dapat dinilai dengan rupiah maka tingkat kinerja aset dibanding dengan nilai rupiah yang dikeluarkan akan sangat efektif.

- *Peningkatan pengelolaan aset. Peningkatan layanan publik.* Aset yang dikelola dengan baik dan digunakan secara efisien memungkinkan Kementerian Keuangan untuk memberikan layanan publik yang lebih cepat dan responsif.
- *Sesuai dengan arah kebijakan* Pengelolaan Keuangan Negara. Pengelolaan Keuangan Negara yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci kesuksesan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.
- *Adaptasi kearah yang lebih baik.* Kolaborasi secara tidak langsung menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang matang dan fleksibel dalam adaptasi atas kebutuhan dan perubahan zaman sehingga mampu memfasilitasi pertukaran ide dan inovasi dalam peningkatan kinerja khususnya dalam penggunaan aset dan teknologi.

“Membumikan” Kebijakan Kolaborasi Penggunaan Aset Di Lingkungan Kemenkeu

Dalam upaya penerapan strategi Kolaborasi Penggunaan Aset di lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh pihak mulai dari level pimpinan tinggi hingga level pelaksana harus turut serta mendukung dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dalam penerapan kebijakan baru akan sangat wajar jika ada resistensi dari berbagai pihak, baik dari level pimpinan sampai level pelaksana, hal ini terjadi karena kebiasaan yang telah ada sejak lama bahwa aset merupakan fasilitas yang dimiliki pada satuan kerja tertentu tanpa berbagi dengan unit lain. Dalam upaya mengajak seluruh pihak untuk

dapat dengan sadar dan Bahagia untuk melaksanakan program tersebut diperlukan usaha yang terstruktur. Dalam upaya menjadikan kebijakan tersebut sebagai budaya, bisa meminjam konsep 5A yang dikembangkan oleh Philip Kotler dalam tahapan strategi marketing, sebagai berikut:

1. *Aware.* Pada tahapan ini, diharapkan seluruh pihak mulai sadar bahwa telah ada kebijakan terkait strategi kolaborasi penggunaan aset bersama melalui penyampaian informasi dengan berbagai media.
2. *Appeal.* Setelah pihak tersebut *aware* atas adanya kebijakan tersebut, target selanjutnya adalah membuat pihak-pihak tersebut merasa *relate* dengan kebutuhan organisasi dan secara personal. Sebagai pembuat kebijakan, pada tahapan ini harus mampu menjaga ekspektasi dan semakin menarik minat para pihak dimaksud.
3. *Ask.* Pada tahapan ini, para pihak aktif bertanya dan mencari informasi secara detail dan mendalam tentang bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. Sebagai pembuat kebijakan, pada tahap ini harus bisa memberikan informasi yang akurat, jelas, dan membantu menjawab serta merespon atas pertanyaan dan keraguan dari berbagai pihak tersebut.
4. *Act.* Pada tahapan ini pembuat kebijakan harus memastikan bahwa kebijakan ini memberikan kemudahan terhadap operasional organisasi serta dalam pelaksanaannya harus dipastikan organisasi mendapatkan pengalaman positif.
5. *Advocate.* Pada tahapan ini, semua organisasi yang telah melaksanakan kebijakan merasakan puas dengan

pengalaman yang didapatkan dan akan dengan senang hati melaksanakan dan merekomendasikan kepada pihak-pihak lain.

Mengimplementasikan kebijakan kolaborasi penggunaan aset di lingkungan Kementerian Keuangan tidak hanya mendorong efektifitas dan efisiensi kinerja, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap usaha pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan Kemenkeu Satu. Kebijakan Kolaborasi Penggunaan Aset Bersama sangat mungkin diimplementasikan di lingkungan Kementerian Keuangan, apalagi dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan dan ketersediaan sumber daya Kementerian Keuangan saat ini.

Untuk mewujudkan Kemenkeu Satu, semua pihak harus menyatukan visi dan misi dan menghilangkan “silo-silo” antar unit. Mari hilangkan ego sektoral antar unit dan menyamakan persepsi bahwa seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Satu Keluarga Kementerian Keuangan.

“Bagaimana bisa menjadi Kemenkeu Satu jika berbagi aset yang bukan milik pribadi saja tidak mau.”

-Gayuh-



Foto : Rodhie Febrian

Belajar dari Sejong: “Inspirasi untuk Ibu Kota Negara baru Indonesia”

Ditulis oleh Rodhie Febrian

Sejong, menjadi salah satu model referensi yang dapat diadopsi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Indonesia. Kota Sejong di Korea Selatan, yang dikenal sebagai ibu kota administratif kedua Korea Selatan, menawarkan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana membangun kota yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.

Sejarah Pembangunan

Pembangunan Kota Sejong dimulai pada tahun 2007 dan resmi dibuka pada tahun 2012. Ide pemindahan ibu kota dari Seoul ke Sejong pertama kali digagas oleh Presiden Roh Moo-hyun pada tahun 2003. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan kemakmuran dan pengaruh yang selama ini terkonsentrasi di Seoul ke daerah lain, mengurangi kepadatan penduduk di Seoul, serta mendorong pembangunan daerah.



Foto : Rodhie Febrian



Foto : Rodhie Febrian

Konsep Pembangunan

Sejong dikembangkan dengan konsep kota pintar (*smart city*) dan ramah lingkungan (*green city*). Kota ini mengintegrasikan teknologi canggih dalam berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup penduduknya. Beberapa fitur utama yang mencolok di Sejong antara lain:

1. **Bangunan Pintar (*Smart Buildings*):** Bangunan di Sejong didesain dengan teknologi canggih yang mengoptimalkan penggunaan energi dan sumber daya. Ini termasuk sistem manajemen energi yang cerdas, sensor untuk memonitor kualitas udara, serta sistem pengelolaan air yang efisien.
2. **Ruang Hijau (*Green Spaces*):** Sejong dirancang dengan proporsi ruang terbuka hijau yang signifikan, mencapai sekitar 60% dari total luas kota. Ini mencakup taman, hutan kota, dan danau buatan yang berfungsi sebagai paru-paru kota serta tempat rekreasi bagi warga.

Fitur dan Inovasi di Kota Sejong

Kota Sejong dirancang dengan banyak ruang hijau dan taman, menjadikannya salah satu kota ter hijau di Korea Selatan. Perencanaan kota ini juga sangat memperhatikan lingkungan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan bangunan hemat energi. Salah satu fitur utama Sejong adalah pusat administrasi pemerintah yang modern, di mana banyak kementerian dan lembaga pemerintah Korea Selatan dipindahkan. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi kepadatan di Seoul tetapi juga mendistribusikan pembangunan ekonomi lebih merata ke bagian lain negara tersebut.

Selain itu, Sejong City juga memiliki fokus kuat pada pendidikan dan penelitian. Kota ini adalah rumah bagi beberapa universitas dan lembaga penelitian yang berfokus pada teknologi tinggi dan inovasi, yang diharapkan dapat menarik talenta-talenta terbaik dari dalam dan luar negeri.

Relevansi untuk IKN Nusantara

Pemerintah Indonesia, dalam pembangunan IKN Nusantara dapat belajar banyak dari pengalaman Sejong. Beberapa aspek yang dapat diadopsi antara lain:

1. *Perencanaan Berbasis Teknologi.* Menggunakan teknologi canggih untuk mengelola sumber daya, meningkatkan efisiensi energi, dan menyediakan layanan publik yang lebih baik.
2. *Ruang Terbuka Hijau.* Mengalokasikan ruang yang cukup untuk taman dan area hijau untuk memastikan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi penduduk.

3. *Kolaborasi dan Dukungan Pemerintah.* Memastikan ada dukungan penuh dari berbagai tingkat pemerintahan serta kolaborasi dengan pihak swasta untuk memastikan keberhasilan proyek.
4. *Infrastruktur Transportasi.* Membangun jaringan transportasi yang efisien yang menghubungkan IKN dengan kota-kota besar lainnya, memudahkan mobilitas penduduk dan pegawai pemerintah.
5. *Pusat Administrasi Terpadu.* Memusatkan kantor-kantor pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi antar lembaga.
6. *Pusat Pendidikan dan Penelitian.* Membangun institusi pendidikan dan penelitian yang unggul untuk menarik talenta dan mendorong inovasi.

Kota Sejong merupakan contoh yang inspiratif dalam pembangunan kota baru yang modern dan ramah lingkungan. Pengalaman dan pencapaian Sejong memberikan banyak pelajaran berharga yang dapat diadaptasi oleh IKN Nusantara. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan IKN Nusantara dapat berkembang menjadi ibu kota yang efisien, berkelanjutan, dan nyaman bagi seluruh penduduknya.

Kota Sejong adalah contoh sukses dari perencanaan kota modern yang berkelanjutan dan efisien. Dengan belajar dari pengalaman Sejong, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun Ibu Kota Nusantara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif tetapi juga menjadi kota masa depan yang ramah lingkungan dan layak huni bagi generasi mendatang.



Foto: Rodhie Febrian

Langkah Lebar Pemenuhan Hunian Pegawai Kemenkeu Satu

Ditulis oleh Budi Susanto

Telah jamak diketahui bahwa *papan* (tempat tinggal/hunian) merupakan satu dari tiga kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan. Kebutuhan akan tempat tinggal juga merupakan hal paling mendasar dalam piramida kebutuhan Maslow. Dalam konteks berorganisasi, penyediaan fasilitas hunian bagi pegawai dipercayai mampu memberikan feedback yang baik bagi organisasi. Attwater (2014) menyatakan bahwa organisasi yang intensif aset atau memperhatikan tata kelola asetnya, semakin mengandalkan asetnya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan menjaga kesinambungan organisasi.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa pemenuhan kebutuhan hunian bagi pegawai bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Organisasi menghadapi berbagai tantangan, diantaranya prioritas organisasi dan tentu saja terkait dengan budget yang dimiliki. Bagi sebagian organisasi, pemenuhan papan bagi pegawai mungkin belum atau bukan menjadi prioritas untuk dipenuhi, apalagi jika organisasi merasa bahwa hunian pegawai biarlah menjadi urusan pegawai masing-masing.



Foto : Budi Susanto/Rusunara Merauke



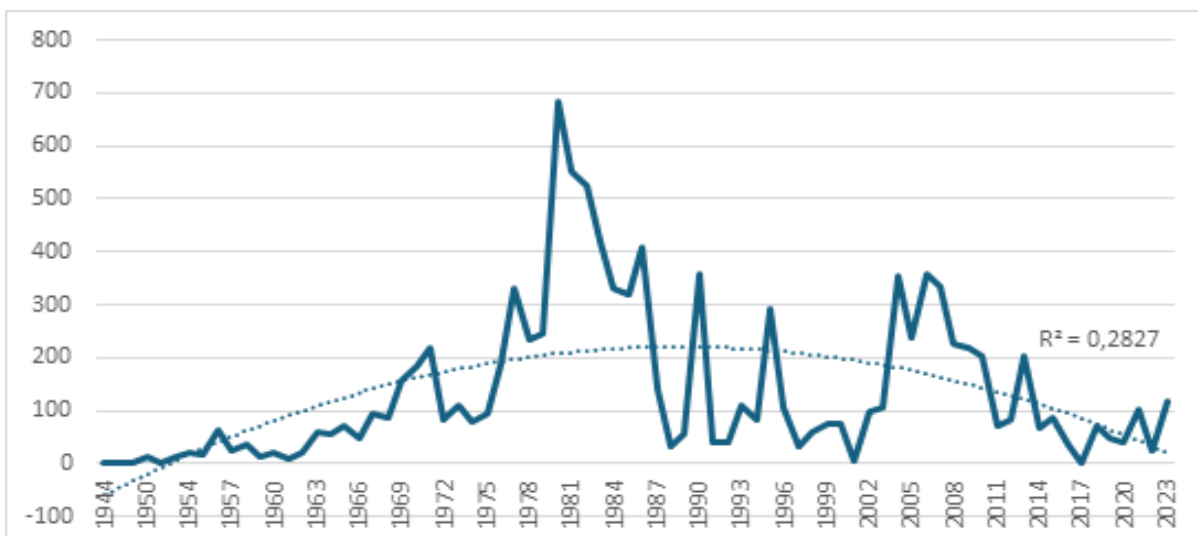
Foto : Website DJBC Kepri

Lalu, bagaimana dengan Kementerian Keuangan?

Sebagai organisasi besar di Indonesia, Kementerian Keuangan cukup serius dan perhatian terhadap tata kelola aset yang dimiliki. Secara khusus pimpinan menegaskan kembali *concern* organisasi terhadap pemenuhan hunian bagi pegawai pada *Leaders Offsite Meeting* (LOM) yang dilaksanakan di Jawa Timur pada awal tahun 2023. Menteri Keuangan menekankan urgensi peningkatan kesejahteraan pegawai dimana pemenuhan kebutuhan hunian pegawai menjadi salah satu diantaranya.

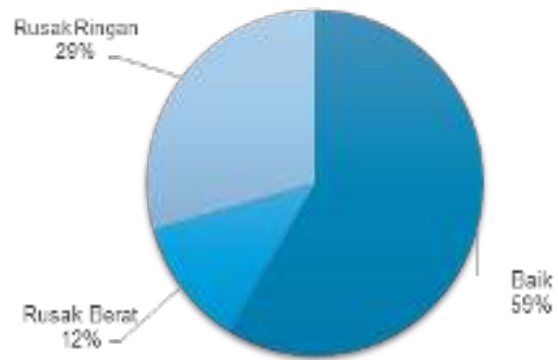
negara *existing*, Kemenkeu sendiri saat ini masih sangat membutuhkan rumah negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Pertumbuhan jumlah pegawai dengan jumlah hunian yang tersedia tidak berada pada laju yang sama. Saat ini, jumlah pegawai di Kementerian Keuangan mencapai angka sekitar 79 ribu pegawai. Sementara itu, jumlah hunian berada di angka 10.448 unit dengan laju pertumbuhan menunjukkan laju tren polynomial dimana peningkatan signifikan terjadi di periode tengah antara tahun 1970-an hingga awal 1980-an, diikuti penurunan bertahap (Gambar 1).

Melihat data jumlah pegawai dengan data rumah



Gambar 1. Tren perolehan Rumah Negara Kemenkeu, sumber: SIMAN, diolah

Jumlah kebutuhan hunian bagi pegawai Kemenkeu masih sangat banyak. Apabila menggunakan skema kasar dimana 2 pegawai mendapat 1 hunian, *gap* kebutuhan hunian masih sangat lebar. Ditambah lagi, tidak seluruh rumah negara *existing* dalam kondisi yang layak huni. Dari sisi kondisi fisik, rumah negara yang kondisinya Baik hanya berjumlah 6.120 unit atau sebesar 58,58%, sementara sisanya tercatat dalam kondisi Rusak Ringan sebesar 3.063 (29,32%) dan Rusak Berat 1.265 (12,11%). *Gap* tersebut akan semakin lebar ketika kita memasukkan variabel penghunian dimana kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat rumah *existing* yang dihuni pihak yang tidak berhak.



Gambar 2. Distribusi kondisi rumah negara Kemenkeu, sumber: SIMAN, diolah

Namun, sejenak kita melangkah maju, dengan satu poin: *gap* kebutuhan hunian bagi pegawai Kementerian Keuangan masih sangat lebar. Lalu, apakah Kementerian Keuangan diam saja melihat kondisi tersebut?

Concern pimpinan terhadap tata kelola aset bagi kesejahteraan pegawai tentu saja merupakan poin krusial bagi rakyat Kemenkeu terutama bagi Biro Manajemen BMN dan Pengadaan (Romadan) yang merupakan perpanjangan tangan Menteri Keuangan dalam tata kelola BMN di lingkup Kementerian Keuangan.

“Kemenkeu bergerak, Kemenkeu melangkah!” memantapkan niat dan memulai perjalanan pemenuhan kebutuhan hunian pegawai dengan penuh antusias. Dikomandoi oleh Romadan, segenap elemen pegawai dikerahkan untuk sumbang tenaga dan pikiran. Di payungi dengan Keputusan Kepala Biro Nomor KEP-28/SJ.7/2023, setiap elemen bergerak dengan penuh harmoni. Langkah strategis diambil, profiling aset dilakukan pada seluruh kota dan kabupaten di Indonesia dan disusun suatu konsepsi pemenuhan kebutuhan aset terutama untuk gedung kantor dan hunian.

Sinergi yang merupakan nilai Kemenkeu ditunjukkan dengan kerja bersama dengan Perwakilan Kemenkeu di daerah. Romadan memantikkan api semangat ke berbagai Perwakilan Kemenkeu di daerah agar menjadi penggerak dan koordinator satker Kemenkeu yang berada di wilayah kerjanya. Ibarat kuda lepas dari pingit, arahan LOM tersebut seolah menjadi prasasti dan pelecut bagi Kementerian Keuangan untuk *me-restart* dan meluruskan niat untuk berbenah demi peningkatan kesejahteraan pegawai dan kinerja organisasi.

Menghadapi *budget constraint* yang ada, Romadan tidak kehilangan daya upayanya. Dengan tetap konsisten

dan *prudent* menjaga keuangan negara, putar-putar kepala pun dilakukan untuk mengejawantahkan niat baik pemenuhan kebutuhan hunian pegawai ini. Ibarat MacGyver yang selalu menemukan solusi dalam berbagai kondisi, “*rawe-rawe rantas, malang-malang putung*”, pepatah Jawa yang kurang lebih memiliki pesan mengenai kesabaran, ketekunan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan atau rintangan dalam hidup. Kemenkeu tetap gigih dan pantang menyerah, serta percaya bahwa “*ada banyak jalan menuju Roma*”.

Pemenuhan kebutuhan hunian ini membawa semangat optimalisasi aset *existing* yang dimiliki oleh Kemenkeu. Sinergi dan kerjasama dengan pihak lain (diantaranya Kementerian PUPR, Ditjen Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang, DJPPR, dan juga Badan Usaha) menjadi strategi pemenuhan kebutuhan papan pegawai. Skema pemenuhan hunian tidak lagi terbatas dalam bentuk rumah negara (*landed house*) namun juga melalui skema pemenuhan hunian dengan bentuk vertikal seperti rumah susun negara (rusunara) ataupun hunian dalam bentuk mess/asrama/hunian bersama lainnya. Paling tidak, terdapat tiga skema kerjasama yang dilakukan Kemenkeu untuk pemenuhan hunian pegawai: *Pertama*, skema pemenuhan hunian dengan pembangunan rusunara yang dibangun melalui kerjasama dengan Kementerian PUPR. *Kedua*, skema pemenuhan hunian dengan pembangunan rusunara dengan pembiayaan surat berharga syariah negara. *Ketiga*, skema pemenuhan hunian dengan pembangunan rusunara dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dan terakhir, skema pemenuhan hunian dengan pembangunan rusunara atau hunian bersama dengan DIPA Kementerian Keuangan.



Lalu bagaimana hasilnya?

Hasil paripurna tentu saja masih terlalu dini. Namun salah satu output yang sudah dapat dilihat adalah rusunara Kemenkeu yang sudah berdiri tegak di bumi Papua yaitu satu di Jayapura dan satu lagi di Merauke. Rusunara ini merupakan hasil kerjasama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Bahkan secara khusus, ibu Sri Mulyani Indrawati datang langsung dan meresmikan selesainya pembangunan rusunara Jayapura pada awal tahun 2024 ini di Jayapura. Pembangunan rusunara di tanah Papua ini menunjukkan kehadiran pemerintah pusat pada setiap jengkal tanah air. Srikandi kebanggaan Indonesia tersebut menekankan agar rusunara yang merupakan aset negara dipelihara dengan baik dan diperhatikan keberlangsungannya.

Senada dengan arahan Menteri Keuangan, pembangunan rusunara Jayapura dan Merauke

bukanlah yang terakhir. Aset Kemenkeu di kawasan Renon, Denpasar yang telah dilakukan penertiban dengan penuh keringat dan air mata, saat ini sedang dilakukan pekerjaan konstruksi pembangunan dua tower rusunara di tahun ini. Hegemoni rusunara sebagai salah satu skema pemenuhan hunian pegawai tampaknya masih akan berlanjut. Usulan pembangunan rusunara melalui kerjasama dengan Kementerian PUPR yang masih dalam progres diantaranya rencana pembangunan rusunara di Mimika, Balikpapan, Pontianak, Serang, Samarinda, dan Makassar. Sementara itu, skema SBSN, KPBU serta skema mandiri dengan dipa Kemenkeu masih terus diupayakan. Harapannya, diversifikasi strategi ini menjadi alternatif solusi Kemenkeu untuk melebarkan langkah dalam pemenuhan papan bagi pegawai Kemenkeu.

*“Sebuah asa, upaya, dan kerjasama berpadu dalam perjalanan mulia demi kesejahteraan bersama **Kemenkeu Satu**.”*

-Budi-



Foto : Much Hari Cahyo

KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI : Langkah Kecil Memaknai Transisi Energi

Ditulis oleh Budi Susanto

Upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih

Upaya global untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkesinambungan mengarah pada transisi energi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik (EV) sebagai salah satu solusi utama. Penggunaan kendaraan listrik diyakini tidak sebatas meningkatkan efisiensi energi, namun dapat juga mengurangi polusi udara secara signifikan dan berbagai dampak negatif dari perubahan iklim.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan salah satu penghasil emisi karbon terbesar, memiliki peran krusial dalam upaya menanggulangi perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang bersih. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengurangi dampak lingkungan dan mempercepat transisi menuju energi bersih diantaranya adalah meratifikasi *Paris Agreement* dan juga ikut berkomitmen dalam konferensi perubahan iklim COP26 and COP27.

Sebagai wujud komitmen terhadap *Paris Agreement*, Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Sementara itu, dalam COP26 and COP27, Indonesia

menegaskan komitmennya untuk mencapai *net-zero emissions* pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional. Untuk menjaga komitmen terhadap kesepakatan internasional, pemerintah menempuh beberapa langkah diantaranya inisiatif implementasi kendaraan listrik.

Melalui Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019, pemerintah menetapkan kerangka kebijakan komprehensif untuk mempercepat pengembangan dan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Intervensi ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif untuk transisi ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diantaranya melakukan berbagai insentif, pengembangan infrastruktur, dan dukungan regulasi.

Dalam lingkup internal pemerintah, Presiden juga telah memberikan instruksi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional sebagaimana diinstruksikan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Inpres 7 Tahun 2022).



Foto : Arsip MTDI



Foto : Arsip MTDI

Progres Hasil intervensi pemerintah

Berbagai bauran intervensi pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dapat dilihat dari jumlah populasi kendaraan listrik dan juga sarana pendukung. Kementerian Perindustrian mencatat populasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) meningkat pesat pada 2023, dengan penambahan roda dua mencapai 262 persen. Penambahan populasi kendaraan listrik roda dua bertambah dari 17 ribu pada tahun 2022 menjadi 62 ribu pada tahun 2023. Sementara untuk kendaraan bermotor empat pada 2023 meningkat dari 8 ribu unit pada 2022 menjadi 12 ribu unit pada tahun 2023 (Antara, 2024).

Sarana prasarana berupa Data Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) sudah tersedia di beberapa titik di Indonesia. Tercatat SPKLU di Indonesia berjumlah 842 unit sedangkan untuk SPBKLU sebanyak 1.331 unit.

Upaya Kementerian Keuangan dalam implementasi KBLBB

Menindaklanjuti Inpres 7 Tahun 2022, Menteri Keuangan selaku pengelola keuangan negara telah mendetailkan skema percepatan penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintah pusat dengan intervensi berupa penundaan atau moratorium kendaraan dinas selain KBLBB yang dilakukan secara bertahap mulai tahun 2023. Menteri Keuangan juga menetapkan standarisasi sebagai pedoman dalam implementasi KBLBB sebagai kendaraan dinas. Melalui standarisasi tersebut, instansi yang akan mengusulkan rencana pengadaan KBLBB dapat mengacu pada ketentuan mengenai batas harga tertinggi (Standar Biaya Masukan) dan juga Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Acuan SBSK ini diharapkan mempermudah instansi dalam upaya memenuhi kebutuhan kendaraan dinas berupa KBLBB.

Sementara itu, di lingkup internal Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku manajer aset Kementerian Keuangan mengupayakan percepatan penerapan KBLBB secara bertahap mulai tahun anggaran 2023. Instrumen yang digunakan untuk percepatan penggunaan KBLBB diantaranya dimulai dari usulan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) yang disusun dua tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Moratorium penggunaan kendaraan non KBLBB diwujudkan dengan melakukan penolakan usulan kendaraan dinas konvensional melalui mekanisme penelitian RKBMN Pengadaan. Percepatan pelaksanaan KBLBB untuk kendaraan bermotor roda empat (Kendaraan Jabatan ataupun Kendaraan Operasional) ditargetkan untuk lokasi tertentu secara bertahap. Sementara itu, percepatan pelaksanaan KBLBB kendaraan bermotor roda dua ditargetkan untuk seluruh satuan kerja yang lokasinya telah tersedia sarana SPKLU dan/atau SPBKLU.

Dari intervensi melalui RKBMN Pengadaan, Kementerian Keuangan telah mengusulkan rencana pengadaan kendaraan listrik pada tahun 2025 sebanyak 1.447 unit dari total usulan kendaraan sebanyak 1.839 unit. Jumlah ini menunjukkan bahwa usulan kendaraan listrik sudah mendominasi usulan kendaraan konvensional dengan persentase mencapai 78,7% dari total usulan kendaraan.

Uraian Barang	KBLBB	Konvensional	Total
Kendaraan Roda 4	448	328	776
Kendaraan Roda 2	999	64	1.063
Total	1.447	392	1.839

Sumber : Usulan RKBMN Hasil Penelaahan TA 2025, SIMAN, diolah

Aktivitas Kementerian Keuangan dalam mendukung penggunaan kendaraan listrik juga dibuktikan dengan ikut serta dalam program konversi sepeda motor konvensional menjadi KBLBB melalui kerjasama dengan Kementerian ESDM. Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam program konversi dengan mengirimkan 7 unit sepeda motor untuk dikonversi oleh Kementerian ESDM c.q. Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Program konversi ini paling tidak memiliki dua manfaat yaitu peremajaan sepeda motor *existing* dan juga sebagai alternatif pemenuhan KBLBB.

Upaya Kementerian Keuangan tersebut diharapkan mampu untuk menuai manfaat positif dari implementasi kendaraan listrik untuk menciptakan lingkungan dengan kualitas udara yang semakin baik dan penggunaan energi terbarukan yang lebih efisien.

Tantangan transisi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik

Meskipun manfaatnya jelas, beberapa tantangan dalam transisi kendaraan BBM ke kendaraan listrik masih menemui tantangan yang perlu diatasi, diantaranya:

1. **Infrastruktur Pengisian** yang masih perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kurangnya infrastruktur pengisian yang memadai memerlukan investasi yang cukup besar untuk pembangunan jaringan stasiun pengisian yang luas dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Biaya Awal yang Tinggi**: Meskipun biaya operasional kendaraan listrik lebih rendah dalam jangka panjang, biaya awal pembelian kendaraan listrik masih relatif tinggi dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Insentif pemerintah dan penurunan harga baterai diharapkan dapat mengurangi kendala ini.
3. **Kapasitas dan Teknologi Baterai**: Teknologi baterai masih memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas penyimpanan, waktu pengisian, dan umur pakai. Penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja baterai dan membuatnya lebih efisien.

Transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik merupakan langkah krusial dalam upaya global untuk mencapai lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kendaraan listrik menawarkan banyak manfaat, termasuk pengurangan emisi karbon, peningkatan kualitas udara, dan efisiensi energi yang lebih tinggi. Langkah Kementerian Keuangan untuk mendukung komitmen pemerintah terhadap isu global penanggulangan perubahan iklim diharapkan menjadi langkah kecil yang memberi manfaat, untuk kita, untuk Indonesia.



Foto : Arsip MTDI

PENGELOLAAN BMN : PERANAN UTILISASI DAN OPTIMALISASI BARANG MILIK

NEGARA

Ditulis oleh Dimpos T. Simamora

Kegiatan pengelolaan barang milik negara (BMN) perlu direncanakan secara matang, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dimonitor secara berkala dan dilakukan perbaikan secara terus menerus. Kuncinya, pengelolaan BMN terletak pada strategi utilisasi dan optimalisasi barang milik negara. Utilisasi merupakan kegiatan penggunaan yang menekankan bagaimana kebutuhan BMN dapat dipenuhi sedangkan optimalisasi menekankan pada bagaimana seluruh kapasitas yang melekat pada BMN tercatat dapat didayagunakan secara optimal. Pelaksanaan utilisasi dan optimalisasi BMN akan berdampak nyata pada penyusunan anggaran dan pelaksanaannya pada level yang terbaik. Level yang terbaik tersebut disumbangkan oleh peranan utilisasi dan optimalisasi yaitu bagaimana kebutuhan BMN dipenuhi melalui solusi non anggaran terlebih dahulu sebelum dialokasikan melalui DIPA, bagaimana belanja modal dan pemeliharaan teralokasi dengan tepat dan bagaimana alokasi DIPA dapat terbantu dengan adanya PNB. Apabila hal tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan, maka dampak jangka panjangnya yaitu terdapatnya anggaran APBN yang *agile*, praktis, fleksible dan efisien dibidang pendapatan dan belanja untuk aset negara disetiap tahun anggaran berjalan.

Sederhananya, utilisasi dan optimalisasi adalah bagaimana aset “tidak tidur” dan bekerja secara terus menerus sesuai dengan masa manfaatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, alat ukur utama yang paling menentukan yaitu penyusunan rencana yang matang, proses eksekusi yang terarah, pengawasan dan pengendalian yang efektif serta adanya umpan balik dari setiap peristiwa untuk dijadikan perbaikan dalam penyusunan rencana yang matang pada periode selanjutnya. Sumber data yang digunakan dalam utilisasi dan optimalisasi yaitu data hitungan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), data hasil pengawasan dan pengendalian serta data hasil koordinasi dengan

intansi/unit kerja dimana kesemuanya dimasukkan dalam data rencana penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan (RP4) dan RKBMN. Sejak diimplementasikan pada Kementerian Keuangan, data tersebut mampu menjadi alat deteksi identifikasi aset *underutilize/overutilize*. Identifikasi *under/overutilize* tersebut sangat penting untuk didapatkan karena akan diketahui aset mana saja yang terindikasi belanja pemeliharaan yang tidak perlu, aset mana saja yang dapat dijadikan opsi non kas/APBN, aset yang berpotensi mendapatkan penerimaan negara melalui mekanisme sewa serta opsi pengurangan belanja modal untuk pengadaan aset strategis berupa tanah, gedung kantor dan rumah negara.

Peran pertama yaitu bagaimana kebutuhan dipenuhi melalui solusi non aset/kas. Setiap tahunnya, Kementerian Keuangan menyusun anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana para pegawai terutama tanah, gedung, bangunan kantor dan rumah negara dimana terdapat kebijakan tidak tertulisnya yaitu diupayakan agar mengedepankan solusi non anggaran. pegawai terutama tanah, gedung, bangunan kantor dan rumah negara dimana terdapat kebijakan tidak tertulisnya yaitu diupayakan agar mengedepankan solusi non anggaran. Solusi non anggaran ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) jenis prioritas yaitu penyerahan penguasaan/ kepemilikan di lingkungan Kementerian Keuangan, sesama K/L di pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lembaga independen yang dibentuk UU (lembaga sui generis). Untuk mendukung strategi ini, paradigma yang dikedepankan yaitu bahwa aset tersebut perlu diutilisasi dan dioptimalisasi tanpa harus takut kehilangan atau rasa “merugi” jika diserahkan ke pihak lain.

Melalui budaya Kemenkeu Satu, Kementerian Keuangan membuat *crash program* untuk memikirkan dan mencari tahu kebutuhan sesama Satker Kementerian

Keuangan dalam satu kota/provinsi yang dikomandoi oleh Pengguna Barang/Kepala Perwakilan dengan tetap berkoordinasi dengan Unit Eselon I/KPKNL setempat. Dengan menggemakan bahwa BMN merupakan aset bersama yang perlu dijaga dan digunakan secara bersama, Kementerian Keuangan menggunakan mekanisme alih penggunaan, utilisasi penggunaan dan penggunaan aset bersama.

Prioritas selanjutnya yaitu solusi non aset/kas untuk entitas diluar Kementerian Keuangan dimulai dari sesama Pengguna Barang yang tergabung dalam pemerintah pusat. Biro secara cepat dan tepat menindaklanjuti permintaan pengguna Barang yang lain setelah memastikan tidak adanya kebutuhan. Mekanisme yang digunakan antara Kementerian yaitu alih status penggunaan, penyerahan barang ke pengelola, Penetapan status penggunaan dan penggunaan sementara. Penyerahan kepada pengelola barang dilakukan melalui mekanisme BMN terindikasi *idle* sehingga aset tersebut dapat digunakan K/L lain, didayagunakan oleh lembaga *sui generis*/pemerintah daerah atau dilakukan pemanfaatan BMN oleh pengelola. Berdasarkan data SAKTI, per tahun 2023 telah terjadi aktifitas alih status/alih penggunaan baik internal Kementerian Keuangan maupun non Kementerian Keuangan untuk gedung kantor, rumah negara dan tanah sebanyak 37 unit sebesar 2,1 Triliun. Sementara Kementerian keuangan melakukan hibah atas aset gedung dan bangunan, rumah negara dan tanah sebesar 22,2 Miliar.

Bukankah “merugi” apabila diserahkan kepada instansi lain tanpa mendapatkan aset secara langsung? *Nah*, aspek ini menjadi “pedang bermata dua” yaitu ketika menyerahkan aset, berarti membangun hubungan baik untuk mendapatkan aset sesuai dengan kebutuhan, sehingga terjadi saling bertukar kebutuhan sebagai simbiosis mutualisme. Dengan simbiosis tersebut, Kementerian Keuangan tidak terlalu sulit dalam mencari solusi non aset karena fleksibilitas penguasaan/kepemilikan aset dari/ke Kementerian Keuangan. Berdasarkan data SAKTI, Kementerian keuangan melakukan utilisasi BMN berupa tanah, rumah negara dan gedung kantor sebesar 431 miliar dan sebanyak 49 unit. Melalui hibah, Kementerian Keuangan mendapatkan aset untuk diutilisasi sebanyak 12 unit sebesar 10,147 miliar pada unit eselon I DJP, DJPB dan DJPB.

Peran utilisasi dan optimalisasi kedua yaitu bagaimana belanja modal/pemeliharaan teralokasi dengan tepat. Peranan ini sangat berhubungan erat dengan peran

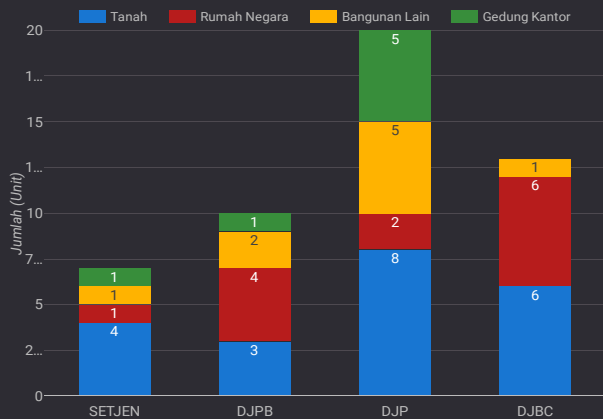
pertama yaitu ketika aset yang *underutilize* dan/atau tidak digunakan diserahkan kepada entitas lain, maka alokasi belanja pemeliharaan dan belanja modal akan berkurang drastis dan terfokus pada aset yang saat ini memang sedang digunakan/dikuasai. Kementerian Keuangan tidak perlu menganggarkan biaya untuk pengamanan listrik, air dan *overhead* lain, kebersihan, lingkungan serta pengawasan dan pengendalian. Satker juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk merehabilitasi, renovasi, restorasi maupun rekonstruksi/pembangunan ulang. Khusus untuk rumah negara, arah kebijakan saat ini yaitu untuk rumah negara berkondisi rusak berat atau yang daerah belum terdapat rumah negara, diupayakan pembangunan kembali menjadi hunian bertingkat/ bukan rumah tapak sehingga dapat mengurangi biaya yang diperlukan. Untuk itu, Kementerian Keuangan mengupayakan utilisasi yang intensif untuk tanah yang sudah ada dan berusaha mencari tanah alternatif untuk pemenuhan rumah negara/gedung kantor.

Peranan terakhir yaitu adanya kontribusi “aset yang bekerja” dalam menghasilkan uang untuk menolong APBN melalui pemanfaatan BMN. Baiknya, peradaban suatu bangsa juga terletak pada bagaimana agar pengelolaan asetnya pada tingkat yang optimal termasuk mengusahakan agar aset dapat menghasilkan sesuatu. Peran ini berhubungan erat hitungan *underutilize* pada suatu entitas memang tidak digunakan. Pemanfaatan BMN menyiratkan bahwa Pengguna Barang fokus pada apakah terdapat sebagian ruangan baik diatas maupun dibawah tanah atau sebagian bidang tanah atau kombinasi keduanya yang dapat dilakukan pemanfaatan.

Pemanfaatan BMN dalam dunia utilisasi dan optimalisasi hanya bisa dilaksanakan apabila kegiatan utilisasi tidak dapat dilakukan baik oleh satker tersebut, satker dalam kemenkeu satu maupun Satker K/L tertentu dan sifatnya hanya sebagian.

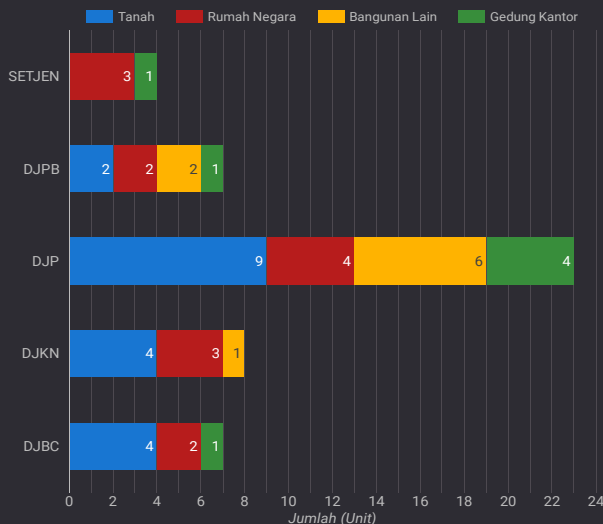
Suka tidak suka, utilisasi dan optimalisasi meskipun memiliki peranan yang paling penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi aset tentunya memiliki tantangan untuk diterapkan. Tantangan tersebut berupa permasalahan yang melekat ke aset, keterbatasan sumber daya, ego sektoral, keengganan melakukan percepatan penyelesaian dan birokrasi.

Daftar Barang Tanah, Rumah Negara dan Gedung Bangunan yang Ditransfer Keluar



UE I	Tipe BMN	Nilai Total (Rp)
1. SETJEN	Tanah	2.002.479.362.910
2. DJP	Tanah	101.959.523.000
3. DJBC	Tanah	19.261.863.000
4. DJP	Gedung Kantor	13.481.608.000
5. DJPB	Tanah	5.824.519.000
6. DJPB	Rumah Negara	3.818.160.000
7. DJP	Bangunan Lain	1.929.915.000
8. SETJEN	Gedung Kantor	1.909.888.000
9. DJBC	Rumah Negara	750.140.950
10. DJPB	Bangunan Lain	241.364.000
11. SETJEN	Rumah Negara	178.600.000
12. DJP	Rumah Negara	168.866.000
13. DJBC	Bangunan Lain	86.090.793
14. DJPB	Gedung Kantor	25.729.000
15. SETJEN	Bangunan Lain	19.156.000
16. DJBC	Gedung Kantor	0

Daftar Barang Tanah, Rumah Negara dan Gedung Bangunan yang Ditransfer Masuk



UE I	Tipe BMN	Nilai Total (Rp)
1. DJBC	Gedung Kantor	243.930.000
2. DJBC	Bangunan Lain	0
3. DJBC	Rumah Negara	338.383.000
4. DJBC	Tanah	154.222.952.000
5. DJKN	Rumah Negara	3.397.301.600
6. DJKN	Gedung Kantor	0
7. DJKN	Bangunan Lain	1.680.238.000
8. DJKN	Tanah	26.040.388.400
9. DJP	Bangunan Lain	2.071.311.000
10. DJP	Tanah	117.745.490.000
11. DJP	Rumah Negara	717.815.950
12. DJP	Gedung Kantor	12.020.764.000
13. DJPB	Rumah Negara	1.909.080.000
14. DJPB	Gedung Kantor	1.909.888.000
15. DJPB	Tanah	106.281.134.000
16. DJPB	Bangunan Lain	139.838.000
17. SETJEN	Tanah	0
18. SETJEN	Rumah Negara	2.324.191.540
19. SETJEN	Gedung Kantor	25.729.000
20. SETJEN	Bangunan Lain	0



Daftar Barang Tanah, Rumah Negara dan Gedung Bangunan yang Dibankan

1 (satu) unit Tanah dengan nilai HKP sebesar Rp618.300.000

2 (dua) Gedung Kantor dengan nilai total sebesar Rp18.988.000

SETJEN

2 (dua) unit Tanah dengan nilai HKP sebesar Rp1.732.381.000

2 (dua) unit Tanah dengan nilai HKP sebesar Rp1.732.381.000

Daftar Barang Hibah Masuk Berupa Tanah, Rumah Negara Dan Gedung Bangunan



MENDUKUNG KEMENKEU MEMBANGUN BUDAYA DATA Melalui Kelengkapan Data Master Aset

Ditulis oleh Komang Debby Puspitarini

“Kita di Kementerian Keuangan sebetulnya **duduk** di atas sebuah **tumpukan data** yang sangat banyak. Pada era digital, yang disebut tambang adalah **tambang data**, tentu data yang kita olah dan pahami.” jelas Ibu Sri Mulyani.



Foto : Biro KLI/Storypost

Setelah melewati revolusi industri 4.0, kini pertumbuhan internet yang cepat mendorong revolusi pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan manajemen. Tidak hanya institusi berorientasi profit, institusi non-profit seperti pemerintah juga membuat keputusan atau merumuskan kebijakan berdasarkan analisis data. Untuk membangun sistem yang “melek” penggunaan data ini tidaklah mudah, membutuhkan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam suatu proses bisnis. Kemampuan untuk menggunakan data dengan tepat akan menjadi kunci kesuksesan di era yang semakin bergantung pada teknologi dan data.

Di Kementerian Keuangan, volume data yang tersimpan pada *data center* mencapai tidak kurang dari 500 terabyte (Dody Dharma Hutabarat, 2021). Di Kementerian Keuangan sendiri sudah muncul kesadaran untuk mengoptimalkan pemanfaatan data. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai acara terkait penerapan data analitik (seperti *hackathon*) dan komunitas. *Chief Transformation Organizer* (CTO) pun mendorong pemanfaatan data ini melalui “membangun budaya data”.

Di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kita dapat mendukung budaya data ini melalui optimalisasi penggunaan Data BMN yang tersimpan dalam *single database* Sistem Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang. Database SIMAN menyimpan data mengenai berbagai jenis aset yang dirinci per satu unit barang atau yang disebut 1 NUP (Nomor Urut Pendaftaran) BMN.

Di setiap unit barang atau satu NUP BMN memiliki rincian dari dokumen awal pengadaan barang tersebut, dokumen kepemilikan, lokasi, nilai barang, nilai penyusutan, masa manfaat barang, data terkait penggunaan/pemanfaatan BMN tersebut, hingga rencana penghapusannya. Untuk BMN berupa tanah, data yang dimiliki berupa luas tanah, jumlah dan luas bangunan yang berdiri di atasnya, bahkan bukti kepemilikannya. Data BMN meliputi BMN yang dikelola oleh 892 satuan kerja yang beroperasi dari Sabang hingga Merauke dan mencakup data BMN berupa tanah hingga BMN berupa satu unit kursi atau *software* yang digunakan oleh satuan kerja.

Untuk melihat rincian satu unit barang, user SIMAN dapat menggunakan Modul Master Aset pada aplikasi SIMAN. Di lingkungan internal Pengguna Barang hingga Kuasa Pengguna Barang kita lebih sering menyebut data BMN ini sebagai data Master Aset. Data inilah yang digunakan Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang dalam kegiatan Pengelolaan BMN dari Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penatausahaan BMN hingga Pengawasan dan Pengendalian atas suatu aset. Oleh karena itu, data terkait BMN ini tergolong vital dalam proses bisnis Pengelolaan BMN.

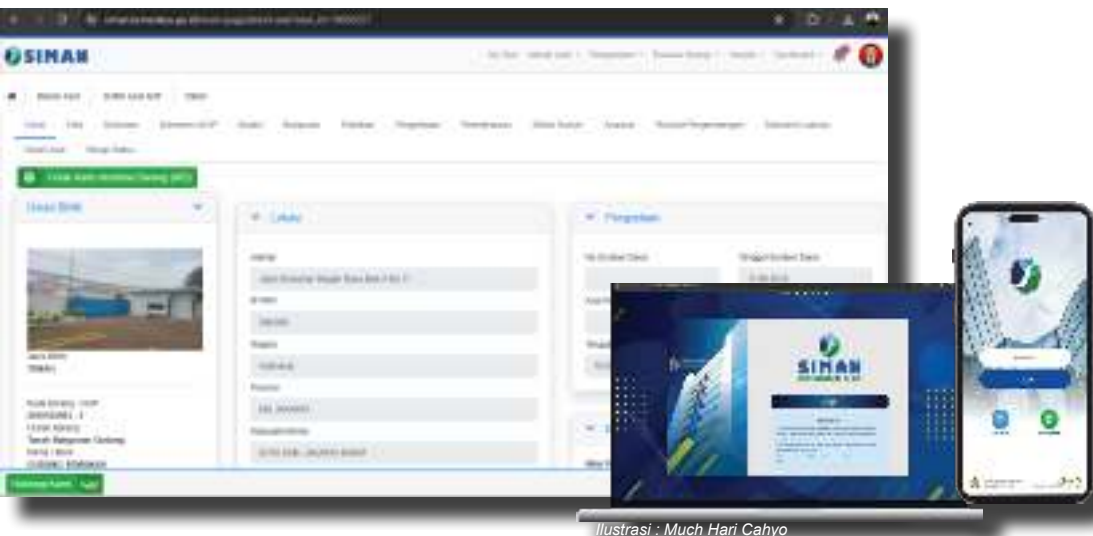
Walaupun data BMN yang disimpan terkesan lengkap dan *real-time*, kebutuhan akan data BMN ini belum dapat terpenuhi. Pada akhir tahun 2022, ketika gagasan untuk melengkapi hunian bagi pegawai dikembangkan, muncul pertanyaan berapa rumah negara yang kosong dan dapat dihuni? Untuk menjawab pertanyaan ini, analisa dengan mengolah data BMN saja tidak cukup. Pada kenyataannya beberapa data rumah negara saat itu tidak dilengkapi dengan data penghuni. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan memberikan himbauan ke Unit Eselon I melalui Nota Dinas Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Nomor ND-201/SJ.8/2023 tanggal 12 Februari 2023 tentang Kelengkapan Data Master Aset SIMAN berupa tanah, gedung dan bangunan, rumah negara serta konfirmasi Kuasa Pengguna Barang agar melengkapi data penghunian.

Kemudian ketika Penataan Kawasan Gedung Kantor dan Hunian Kementerian Keuangan dalam satu Kota/Kabupaten dilakukan, ternyata tidak dapat dilakukan dalam beberapa hari. Pada kenyataannya, data BMN berupa tanah serta gedung dan bangunan saat itu masih banyak yang harus dilengkapi. Data yang diperlukan saat itu misalnya lokasi, kabupaten/kota, provinsi, luas

bangunan dan penghuni rumah negara. Untuk mendapat data tersebut, diperlukan konfirmasi langsung ke satuan kerja yang ada di setiap kota/kabupaten.

Pada tahun 2022 dan 2023, data BMN mendapat perhatian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Jenderal (Itjen). Rekomendasi yang diberikan antara lain data anomali pada tanah bangunan kantor dan bangunan gedung kantor (rekomendasi Itjen tahun 2022), melengkapi data master aset (rekomendasi Itjen tahun 2022), serta perbaikan pencatatan data rumah negara pada Aplikasi SIMAN dengan kondisi sebenarnya (rekomendasi Itjen 2023). Data anomali itu antara lain luas tanah yang lebih kecil dari luas dasar bangunan, luas dasar bangunan yang lebih kecil dari luas bangunan untuk bangunan satu lantai. Data master aset yang perlu dilengkapi untuk tanah serta gedung dan bangunan di antaranya lokasi, luas, batas GPS, status penggunaan, foto, dokumen, status hukum. Khusus untuk bangunan, data master aset yang perlu dilengkapi antara lain lantai dan ruangan, fasilitas, dan konstruksi.

Untuk menyelesaikan rekomendasi Itjen, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan melakukan pemantauan dan himbauan untuk penyelesaian rekomendasi melalui Nota Dinas Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan nomor ND-432/SJ.7/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Permintaan Pemutakhiran Data BMN Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023. Pada penghujung tahun 2023, seluruh data BMN yang dipantau sudah diperbaiki dan dilengkapi. Perbaikan pencatatan kondisi data rumah negara pada Aplikasi SIMAN pun telah diselesaikan pada awal tahun 2024. Dengan adanya Sensus BMN tahun 2023, penyesuaian pencatatan data rumah negara pada Aplikasi SIMAN dengan kondisi sebenarnya sudah dilakukan.



Ilustrasi : Much Hari Cahyo

“Master Aset SIMAN V.2 & Aplikasi SIMAN Mobile modul Inventarisasi”



Foto : Much Hari Cahyo

Sensus BMN merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN dengan maksud untuk mengetahui jumlah, nilai dan kondisi BMN sebenarnya. Tidak hanya rumah negara, objek sensus BMN tahun 2023 adalah BMN yang memiliki Kartu Identitas Barang (KIB) meliputi: tanah, gedung dan bangunan, bangunan air, alat angkut bermotor, senjata api dan alat besar. BMN non-KIB menjadi objek sensus tahun 2024. Kegiatan sensus ini merupakan kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data BMN sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga tersedianya data semua BMN secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, pemutakhiran didefinisikan sebagai:

“Pemutakhiran adalah kegiatan pemutakhiran (updating) data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMN, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMN.”

Di lingkungan Kementerian Keuangan, kegiatan Pemutakhiran BMN merupakan tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

di Lingkungan Kementerian Keuangan, menyebutkan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam Penatausahaan BMN adalah memastikan bahwa semua data BMN yang berada dalam penguasaannya lengkap, akurat dan akuntabel. Mengingat data BMN yang diisi cukup banyak, dibutuhkan kebijakan atau pengaturan terkait data apa saja yang wajib diisi atau terdapat pengaturan pada SIMAN user Pengguna Barang untuk mengatur mana saja data yang wajib diisi, sehingga data master aset hanya dapat disimpan setelah semua isian yang wajib sudah terisi.

Untuk menjamin kelengkapan dan validitas data, konfirmasi langsung ke unit eselon satu dan satuan kerja mungkin dapat menjadi solusi yang mudah. Namun kebutuhan informasi di masa depan mungkin akan meningkat serta mendesak. Saat itu, “konfirmasi” tidak dapat lagi menjadi solusi. Untuk jangka panjang dibutuhkan kegiatan Pemutakhiran Data BMN setiap kali ada perubahan informasi BMN. Kegiatan Pemutakhiran Data BMN inilah yang harus menjadi “budaya” agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pimpinan dan penyediaan data BMN di Kementerian Keuangan yang lengkap, akurat dan akuntabel sehingga proses pengambilan keputusan dapat didukung dengan data yang valid.



Foto : Much Hari Cahyo

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN SIMAN V2

Ditulis oleh Luthfandi F. & Damar Pandu A.

Fungsi pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap Barang Milik Negara (BMN) sudah sangat berkembang dari tahun ke tahun dan lebih kompleks, yang awalnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 52/PMK.06/2016 dan terakhir dengan PMK 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Penetapan ini dilatarbelakangi oleh penguatan organisasi melalui struktur kewenangan dan tanggung jawab masing-masing unit Pengguna dan Pengelola serta simplifikasi proses bisnis dan regulasi dimana pelaksanaan dan pelaporan wasdal dilakukan melalui aplikasi SIMAN yang terintegrasi dengan seluruh Modul pengelolaan BMN, kemudian digitalisasi melalui sistem *Workflow & Approval* dari tingkat Satker sampai dengan tingkat Pengguna/Pengelola sehingga bersifat *paperless*.

Penguatan organisasi dan proses bisnis yang mewujudkan keteraturan yang berjenjang dimulai dari Kuasa Pengguna Barang dan terakhir dilaksanakan maupun dilaporkan oleh Pengguna Barang, dimana objek yang menjadi pemantauan dan penertiban ini dimulai dari siklus penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan.

Pengawasan dan pengendalian BMN di lingkungan Kementerian Keuangan akan menggunakan SIMAN versi 2 dengan modul pengawasan dan pengendalian mulai periode Semester I tahun 2024, dikarenakan merupakan hal yang baru maka diperlukan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan wasdal BMN.

Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pelaporan wasdal yakni (i) Pemantauan Insidentil, (ii) Permintaan Penertiban dan Penertiban, serta (iii) Pemantauan Periodik.

I. Pemantauan Insidentil.

Pemantauan insidentil ini merupakan pemantauan yang bisa dilakukan setiap saat oleh Satker/Pengguna Barang (PB)/Pembantu Pengguna Barang Wilayah (PPB-W)/Pembantu Pengguna Barang Eselon I (PPB-E1) dalam hal terdapat informasi tertulis antara lain dari masyarakat, media massa, laporan hasil audit, info unit lain, info pengelola maupun inisiatif Satker/PB/PPB-W/PPB-E1 untuk BMN penguasannya. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh tim minimal 3 orang serta paling lambat 5 hari kerja sejak diterima info/inisiatif. Dapat dilakukan paling lama 10 hari kerja dan hasilnya dilaporkan paling lama 5 hari kerja. Pemantauan ini dapat dilakukan dengan cara penelitian administrasi (menghimpun informasi dari berbagai sumber, mengumpulkan dokumen, dan meneliti dokumen) dan penelitian lapangan (meninjau objek BMN secara langsung, meminta konfirmasi pihak terkait, serta mengumpulkan data tambahan.)

Berikut alur role petunjuk teknis untuk mengerjakan pemantauan insidentil pada SIMAN V2



II. Petunjuk Teknis Permintaan Penertiban

Penertiban merupakan tindak lanjut atas pemantauan yang dilakukan PB / PPB W / PPB E1 apabila diketahui ketidaksesuaian antara pelaksanaan pengelolaan BMN dengan ketentuan, permintaan dari Pengelola Barang, hasil audit pelaksanaan pengelolaan BMN oleh AP/IP K/L, hasil pemeriksaan BPK.

Sebagai salah satu penertiban atas pengamanan BMN yakni ketika adanya (1) Tanah belum bersertipikat a.n. Pemerintah RI c.q. K/L, (2) BMN dikuasai pihak lain, (3) BMN dalam sengketa.

Proses pembuatan tiket ini, prosesnya mirip seperti pada proses Pemantauan Insidentil, hanya bedanya dilakukan oleh Pengguna Barang di level atas dan Pengelola Barang, tanpa input anggota tim, dan detail inputan sesuai konteks permintaan penertiban. Silahkan merujuk ke slide terkait Pemantauan Insidentil untuk proses penyusunan tiketnya. Setelah tiket Permintaan Penertiban diselesaikan oleh Supervisor PB / Pembantu PB / Pengelola Barang, maka tiket akan masuk ke Submenu Penertiban Satker dengan Dasar Penertiban yaitu Permintaan Penertiban. Satker dapat memproses tiket penertiban seperti biasa. Silahkan merujuk ke Menu Penertiban.

Berikut alur role petunjuk teknis untuk mengerjakan permintaan penertiban pada SIMAN V2



III. Petunjuk Teknis Penertiban

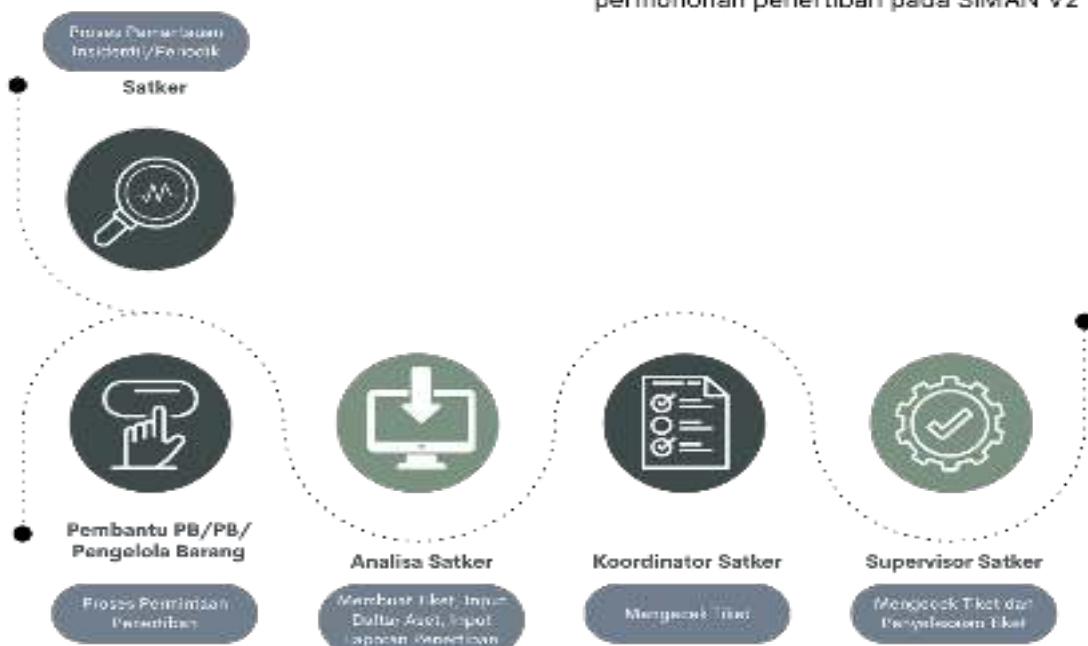
Penertiban oleh satker dapat dilakukan jika Satker telah melakukan Pemantauan Periodik / Pemantauan Insidentil atau Pembantu Pengguna Barang / Pengguna Barang / Pengelola Barang telah melakukan Permintaan Penertiban.

Tiket Penertiban yang berasal dari Proses Permintaan Penertiban akan otomatis terbentuk pada Submenu Penertiban Satker. Sedangkan Tiket Penertiban lainnya,

harus ditambahkan manual dengan memilih Dasar Penertiban yang sesuai, seperti dari hasil Pemantauan Periodik ataupun Pemantauan Insidentil Satker.

Proses pembuatan tiket Penertiban ini pun, prosesnya mirip seperti pada proses Pemantauan Insidentil maupun Permintaan Penertiban, hanya bedanya dilakukan oleh Satker, tanpa input anggota tim dan detail inputan sesuai konteks penertiban. Silahkan merujuk ke slide terkait Pemantauan Insidentil untuk proses penyusunan tiketnya.

Berikut merupakan alur melakukan penertiban setelah dari permohonan penertiban pada SIMAN V2



IV. Petunjuk Teknis Klarifikasi KPB

Saat klarifikasi disampaikan oleh Pengelola Barang kepada Satker, baik Analis, Koordinator, maupun Supervisor mendapatkan notifikasi klarifikasi tersebut. Tetapi, Supervisor Satker harus menerima tiket tersebut terlebih dahulu agar bisa diproses oleh Analis dan Koordinator Satker.

Berikut alur role teknis klarifikasi KPB



V. Petunjuk Teknis Pemantauan Periodik dan Laporan Wasdal

Pemantauan periodik dan laporan wasdal ini dilakukan secara semesteran I, II maupun tahunan. Hal ini untuk memantau atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan, serta pemeliharaan.

Berikut alur role-petunjuk teknis untuk mengerjakan Pemantauan Periodik dan Laporan Wasdal



Ilustrasi : Much Hari Cahyo

Optimalisasi Kendaraan Dinas Operasional

melalui **Aplikasi SI-Kendi**

(Sistem
Informasi
Kendaraan
Dinas)

Ditulis oleh Valiant Billy Brillianto

Pesan tersebut merupakan percakapan yang biasa dihadapi oleh operator/pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Satuan Kerja (satker). Tugas untuk mengelola kendaraan dinas operasional roda empat merupakan pekerjaan rutin yang jarang didokumentasikan proses peminjamannya oleh operator BMN di satker.



Ilustrasi : Much Hari Cahyo

Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan mulai melakukan perubahan terkait simplifikasi peminjaman kendaraan dinas dengan mengembangkan sebuah sistem aplikasi yang bernama SI-Kendi atau Sistem Informasi Kendaraan Dinas yang dapat diakses pada alamat <https://kendi-bo.kemenkeu.go.id/home> atau pada Satu Kemenkeu.

Melalui nota dinas Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan telah disampaikan arahan serta mekanisme terkait peminjaman kendaraan dinas operasional roda empat melalui Aplikasi Sikendi tersebut kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan operator BMN satuan kerja dan pegawai untuk dapat mulai mengelola kendaraan dinas operasionalnya dengan aplikasi SI-Kendi.

Operator BMN dapat mengajukan permintaan role pengelola kendaraan dinas di aplikasi dengan mengirimkan Nota Dinas kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Setelah mendapatkan role, operator BMN dapat mulai mengelola kendaraan operasional yang tersedia di satkernya. Operator BMN dapat mengatur apakah “kendaraan tersedia”, “kendaraan dalam perbaikan”, atau “kendaraan tidak dapat dipinjam”.

Kendaraan operasional dalam status “tersedia” ini dapat diatur oleh operator BMN untuk dapat dipinjam dari internal satker saja atau dapat dipinjam dari semua pegawai di Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah kendaraan ini tidak hanya dapat dipinjam oleh pegawai internal di satuan kerja tersebut saja, apabila ada

pegawai satuan kerja lain untuk meminjam kendaraan difasilitasi juga oleh aplikasi ini.

Berikut beberapa langkah untuk dapat meminjam kendaraan dinas melalui Aplikasi SI-Kendi:

- Buka Aplikasi Satu Kemenkeu -> Fasilitas -> Kendaraan Dinas. Selanjutnya, pegawai Kemenkeu dapat meminjam kendaraan operasional satuan kerja dengan menentukan lokasi awal peminjaman, lokasi tujuan peminjaman, keperluan peminjaman, jumlah penumpang dan mengunggah surat tugas pelaksanaan kegiatan.
- Pegawai Kemenkeu yang meminjam kendaraan operasional juga dapat memilih jenis kendaraan yang tersedia. Setelah melaksanakan peminjaman, peminjam wajib mengembalikan kendaraan tersebut kepada pengelola langsung dan secara aplikasi di Satu Kemenkeu.
- Operator BMN sebagai pengelola BMN dapat menyetujui/menolak peminjaman dan menatausahakan peminjaman kendaraan operasional ini.

Dengan adanya Aplikasi SI-Kendi ini, diharapkan proses peminjaman kendaraan operasional dapat tercatat dengan baik, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan, diatur bahwa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam penguasaannya.



Foto : Much Hari Cahyo

TRANSFORMASI GEDUNG KELAS MENJADI ASRAMA

PKN STAN Sulap Aset Negara demi
Optimalisasi BMN

Ditulis oleh Tyta Hanistia Rizkimada



Foto : Much Hari Cahyo / Gedung N, PKN STAN



Ruang Kelas diubah menjadi Kamar Asrama



Ruang Kelas diubah menjadi Ruang Laundry

Utilisasi dan optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu arah prioritas kebijakan yang diutarakan pada *Leaders Offsite Meeting* Kementerian Keuangan pada tahun 2023. Perhatian pimpinan terhadap BMN untuk digunakan secara optimal sehingga mengurangi bahkan meniadakan BMN idle rupanya memantik satuan kerja (satker) bergerak secara kreatif mengelola aset agar lebih berdaya guna.

Salah satu satker yang berkontribusi mengoptimalkan BMN dengan lebih baik adalah Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Reputasi PKN STAN tidak hanya terbatas dalam bidang penyelenggaraan pembelajaran bidang keuangan saja, namun juga sebagai satuan kerja pengelola BMN yang handal.

Salah satu upaya optimalisasi yang dilakukan PKN STAN adalah alih fungsi Bangunan Gedung Kantor Permanen

dan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen menjadi Asrama Permanen. Alih fungsi gedung kelas menjadi asrama mahasiswa adalah langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi kebutuhan tempat tinggal bagi mahasiswa tahun pertama. Transformasi ini tidak hanya memberikan solusi praktis dalam penyediaan fasilitas mahasiswa, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan ruang kampus secara efisien.

Dalam prosesnya, tata cara pengalihan fungsi BMN didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 334 Tahun 2021 tentang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan. KMK yang dikenal sebagai *omnibus-law* di bidang pengelolaan BMN ini memuat aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif mengenai siklus BMN dari Perencanaan hingga Pengawasan dan Pengendalian BMN.



Ex Ruang Kelas Gedung C yang dijadikan Kamar-Kamar Asrama Mahasiswa



Laundry bag di dalam Kamar Asrama



*Ruang Kelas diubah menjadi Ruang Makan Bersama
Foto : Much Hari Cahyo*

Pada KMK tersebut dijelaskan bahwa Pengalihan Fungsi merupakan bentuk optimalisasi BMN untuk dialihkan fungsinya dalam rangka meningkatkan pendayagunaan BMN tersebut. Dalam hal PKN STAN, bangunan yang berfungsi sebagai kelas belajar mengajar dialihkan fungsinya sebagai asrama mahasiswa. Alih fungsi tersebut termasuk ke dalam jenis pengalihan fungsi dengan mengubah klasifikasi. Hal terlihat dari perubahan kodefikasi barang pada daftar barang, di mana sebelumnya BMN Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen diubah menjadi Asrama Permanen.

Tata cara pengalihan fungsi BMN dengan mengubah klasifikasi BMN dimulai dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) yang membutuhkan pengalihan fungsi BMN melakukan dan menyusun analisis kebutuhan BMN, paling sedikit di antaranya meliputi perencanaan penggunaan BMN pada RP4 BMN, alasan yang mendasari, kebutuhan BMN dan dampak penganggaran, keterkaitan dengan tugas dan fungsi, dan daftar BMN yang berkaitan dengan BMN yang menjadi objek usulan pengalihan fungsi BMN.

Permohonan tersebut disampaikan secara berjenjang melalui Sekretariat Unit Eselon I kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Selanjutnya, kepala Biro melakukan penelitian atas permohonan pengalihan

fungsi BMN, dengan memperhatikan Standar Barang/Standar Kebutuhan (SBSK), Standar Spesifikasi/Standar Jumlah (SSSJ), memperhatikan kebutuhan BMN pada Satuan Kerja lain di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah yang sama dengan BMN yang menjadi objek pengalihan fungsi.

Dalam hal permohonan tersebut layak untuk dipenuhi, maka Kepala Biro menerbitkan persetujuan pengalihan fungsi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyesuaian BMN pada Daftar Barang Kuasa Pengguna dan penyampaian laporan pelaksanaan oleh KPB.

Beberapa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada PKN STAN yang dialihfungsikan adalah Gedung C, D, dan E. Gedung yang dikenal berisi kelas-kelas untuk mahasiswa akuntansi, kini difungsikan sebagai asrama putra dengan penghuni berjumlah 192 mahasiswa untuk Gedung C dan D, serta 130 mahasiswa untuk Gedung E. Komplek asrama putri sendiri berada di sisi lain kawasan PKN STAN. Salah satu bangunan asrama putri, yakni Gedung F1 kini berisikan 47 kamar asrama dengan fasilitas yang diseragamkan dengan asrama putra, beberapa di antaranya adalah ruang makan yang juga digunakan sebagai ruang komunal, mushola, dan ruang cuci.



*Ex Asrama Dosen diubah menjadi Asrama Mahasiswa
Foto : Much Hari Cahyo*

Penataan Kawasan

Renon, Bali



Penataan Kawasan Kompleks Rumah Negara merupakan **upaya menjaga aset negara** sebagai bentuk tanggungjawab Kementerian Keuangan dalam **mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara**.

Amankan Aset Negara

Ditulis & Didokumentasikan oleh Jeri Martin

Dalam menjalankan peran sebagai Pengguna Barang, Kementerian Keuangan c.q. Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan senantiasa mengupayakan terwujudnya tertib pengelolaan barang milik negara (BMN), dimana salah satunya adalah melaksanakan pengamanan dan optimalisasi atas BMN Kementerian Keuangan, utamanya terhadap BMN yang berada dalam penguasaan pihak lain yang tidak berhak.

Salah satu lokasi prioritas terkait pengamanan dan optimalisasi atas BMN Kementerian Keuangan adalah BMN berupa rumah negara di Jalan Dr.Muwardi, Renon, Denpasar yang kala itu 40 unit rumah negara berada dalam penguasaan pensiunan dan/atau pihak lain yang tidak berhak, dari 98 unit rumah negara milik Kementerian Keuangan.

Atas kondisi yang ada, selanjutnya dilakukan penertiban atas lahan tersebut untuk kemudian diusulkan optimalisasi dalam bentuk pembangunan hunian bersama bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam bentuk Rusunara Kementerian Keuangan. Opsi optimalisasi dengan skema pembangunan rusunara ini dipilih dengan mempertimbangkan cukup tingginya jumlah kebutuhan hunian bagi ASN yang bertugas di kota Denpasar.

Tidak hanya itu, di lahan seluas 23.990 m² tersebut akan dibangun juga Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar serta Rumah Dinas Jabatan bagi kepala kantor di Denpasar.





Upaya Penertiban Rumah Negara

Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Denpasar, Bali tahun 2022; dan Tim berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-350/SJ/2023 Tentang Pembentukan Tim Penataan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Denpasar, Bali tahun 2023.

Tim ini dibentuk dengan didasari oleh pemahaman bahwa Penataan Komplek Renon ini tidak dapat dilakukan secara parsial per satuan kerja atau per Eselon I, namun harus dilakukan dengan sinergi. Tim yang terdiri dari lintas unit eselon I harus mampu saling berkoordinasi, merumuskan strategi bersama yang jelas, disepakati, dan dijalankan dengan irama yang sama dalam rangka mewujudkan penataan kawasan kompleks Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Renon - Denpasar.

Dalam upaya penertiban rumah negara yang berada dalam penguasaan pensiunan dan/ atau pihak lain yang tidak berhak, selain memberikan Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara, Tim Penataan Kawasan Renon juga melakukan kegiatan *Courtesy Call* kepada beberapa instansi pemerintah di Denpasar seperti:

- DPRD Kota Denpasar;
- Komandan Resort 163 Wirasatya Bali;
- Kepolisian Daerah Bali;
- Kejaksaan Tinggi Bali;
- Pemerintah Daerah Kota Denpasar

hal ini bertujuan untuk permohonan dukungan rencana penataan kawasan dan penertiban kompleks Renon, permintaan pendampingan penertiban rumah negara (koordinasi, supervisi dan sosialisasi) dan menjembatani pejabat instansi vertikal Kemenkeu di Bali dengan

Instansi/Lembaga terkait.

Selanjutnya, Tim Penataan Kawasan Renon juga melakukan pendekatan secara persuasif kepada para penghuni rumah negara yang tidak berhak, serta tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan kearifan lokal dalam kegiatan penertiban yang dilakukan. Adapun bentuk pendekatan dimaksud adalah dengan melaksanakan:

- Sosialisasi terkait Penataan Kawasan dan Penertiban Kompleks Rumah Negara Kemenkeu di Renon, Denpasar kepada para penghuni tidak berhak / pensiunan. Narasumber oleh Kejaksaan Tinggi Bali dan Biro Advokasi, pada Desember 2022;
- Sosialisasi penawaran Rumah Murah bagi Masyarakat Banjar Sembung Sari yang terdampak pembangunan Rumah Susun Negara dan Balai Diklat Keuangan. Narasumber oleh Bank Tabungan Negara, pada Desember 2022;
- Rapat Dengar Pendapat Anggota Komite I Bidang Hukum DPD RI B.65 Provinsi Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M. W. S, sebagai Tindak Lanjut aspirasi masyarakat Sembung Sari atas nama Made Agus Surasa, pada Desember 2022.





Audiensi dan *Courtesy Call* dengan Pemerintah di Denpasar

Tim Penataan Kawasan Renon bersama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan juga melakukan Audiensi dengan Walikota Denpasar dalam rangka koordinasi rencana pembangunan Gedung Pendidikan Balai Diklat Keuangan Denpasar, pada Januari 2023 lalu.

Hal ini dilakukan untuk memperoleh dukungan dari Pemerintah Kota Denpasar hal rencana pembangunan Gedung Pendidikan Balai Diklat Keuangan Denpasar dan perlunya menyampaikan informasi mengenai urgensi pembangunan Balai Diklat Keuangan yang memadai di Kota Denpasar sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dibidang Pengelolaan Keuangan Negara baik bagi peserta pegawai Kementerian Keuangan maupun seluruh pegawai yang berada di Kementerian/ Lembaga maupun para pegawai dari Pemerintah Daerah di Bali.

Narasi Komunikasi Penataan Kawasan Renon

Tim juga telah menyusun narasi komunikasi terkait kegiatan Penataan Kawasan dan Penertiban Rumah Negara Renon Denpasar dengan berkoordinasi dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI).



- Penataan kawasan dan penertiban Kompleks Rumah Negara Kementerian Keuangan di Renon Denpasar Bali merupakan bentuk reformasi yang memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pemerintah daerah pada umumnya, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Kemenkeu (manfaat Uang Kita);
- Penataan Kawasan Kompleks Rumah Negara merupakan upaya menjaga aset negara sebagai bentuk tanggung jawab Kementerian Keuangan dalam mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara;
- Proses penataan kawasan dan penertiban Kompleks Rumah Negara Kementerian Keuangan di Renon dilakukan secara persuasif dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Akhir dari Penertiban Rumah Negara

Pada bulan April tahun 2023, upaya penertiban rumah negara yang berada dalam penguasaan pensiunan dan/ atau pihak lain yang tidak berhak membuahkan hasil yang baik dan telah selesai. 40 Unit Rumah Negara kembali dalam penguasaan Kementerian Keuangan. Selanjutnya tim melaksanakan kegiatan pembongkaran rumah negara, pemerataan rumah negara dan pematangan lahan pembangunan.



Relokasi Balai Banjar Sembung Sari

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan pada Penataan kawasan di kompleks rumah negara Kementerian Keuangan di Jalan Dr. Muwardi , Renon, Denpasar adalah relokasi dan pembangunan kembali Balai Banjar Sembung Sari yang merupakan Banjar Dinas. Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.

Semula Balai Banjar Sembung Sari berada di tengah area lahan pembangunan, namun untuk memudahkan akses bagi masyarakat sekitar untuk menggunakan Balai Banjar tersebut, maka tim penataan kawasan melakukan relokasi dan pembangunan kembali balai tersebut di area depan lahan pembangunan dan dekat dengan jalan raya.

Pembangunan Balai Banjar Sembung Sari dimulai pada bulan Oktober tahun 2023 dan selesai pada Bulan Maret 2024.





Kunjungan Menteri Keuangan ke Lokasi Pembangunan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan peninjauan lokasi pembangunan Rumah Susun Negara (Rusunara) Denpasar dan Balai Diklat Keuangan Denpasar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang merupakan bagian dari program penataan kawasan di Renon, Bali pada bulan Januari lalu.

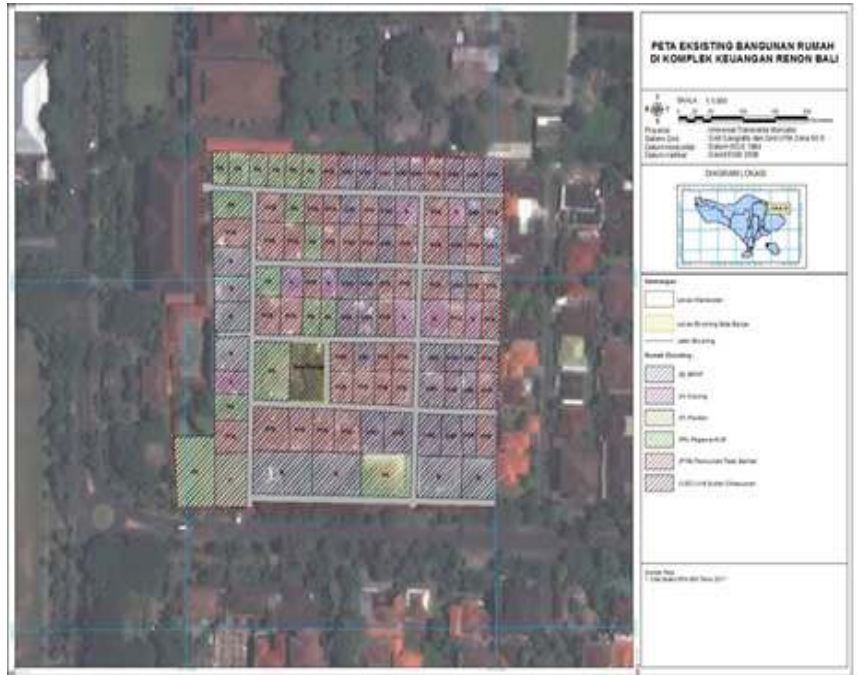
pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar dan Rusunara Kemenkeu Bali yang kemudian dilanjutkan dengan agenda menanam pohon bersama di lokasi pembangunan.

Dalam kunjungannya tersebut, Ibu Sri Mulyani Indrawati yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Heru Pambudi dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Bapak Andin Hadiyanto, juga melakukan momentum peletakan batu



Rencana Pembangunan Kawasan

Ditulis oleh Daviq Suparwanto



Gambar 1 Peta Eksisting Bangunan Rumah Di Komplek Keuangan Renon Bali
Sumber : Tim Konsultan Masterplan, 2022

Untuk mewujudkan optimalisasi penggunaan lahan dan penataan BMN pada kompleks Keuangan di Renon Bali diperlukan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan sehingga diperlukan suatu masterplan kawasan yang mempertimbangkan berbagai aspek optimalisasi manfaat, aspek tata ruang, aspek lingkungan, dan aspek keselarasan terhadap kearifan lokal. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan ahli melalui pengadaan jasa konsultansi pembuatan masterplan dimaksud. Pembuatan *masterplan* dilaksanakan pada tahun 2022 yang dilakukan oleh penyedia jasa konsultansi. Kondisi kompleks rumah negara Kementerian Keuangan di Renon - Bali sebelum dilakukan penertiban dan penataan kawasan adalah sebagaimana gambar 1.



Beberapa langkah awal pembangunan kawasan yang ditetapkan dalam masterplan yaitu:

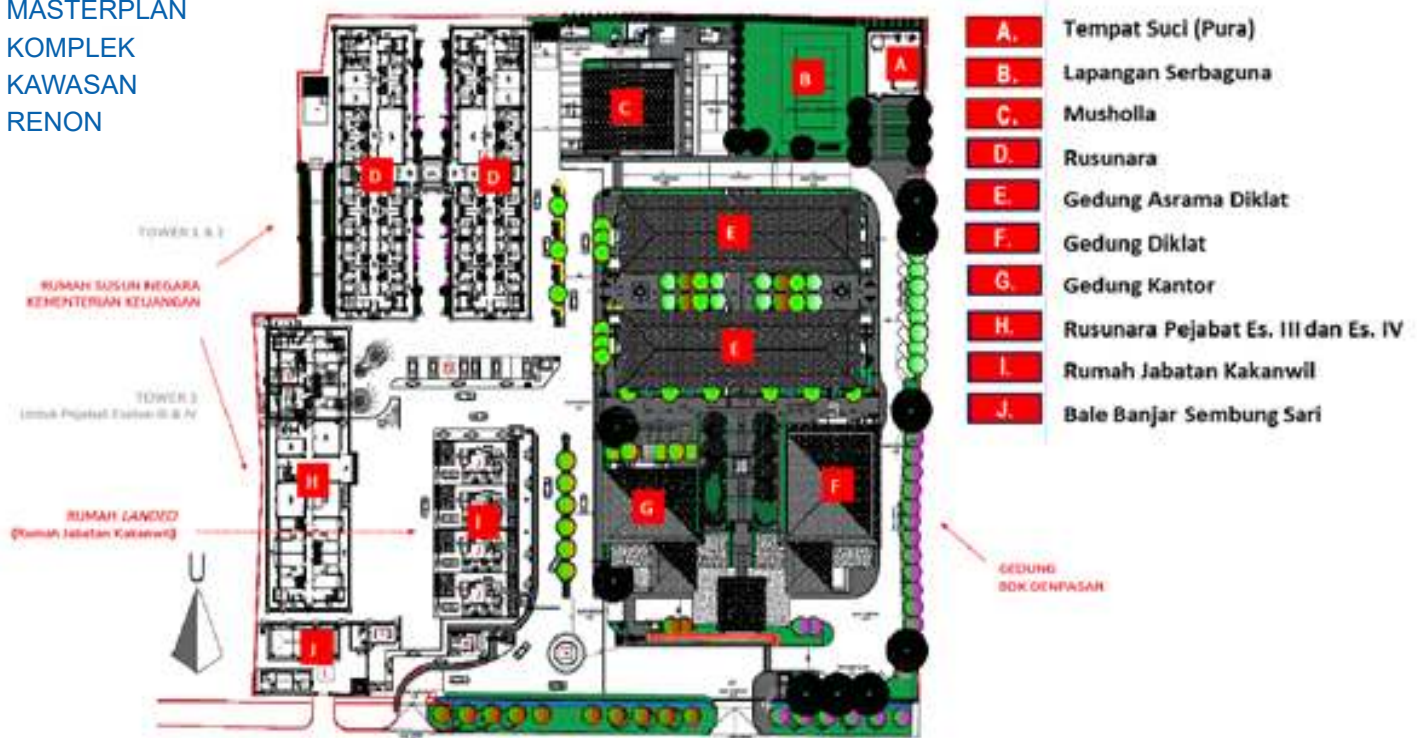
1. Mempertimbangkan lokasi eksisting level site berada sejajar dengan level jalan, dimana dalam penerapannya level jalan akan terus bertambah sehingga akan berpotensi level site berada lebih rendah dari level jalan, selain itu level kemiringan drainase juga akan berpengaruh terhadap leveling site karena jalur drainase akan mengarah cenderung ke Riol Kota, oleh karena itu guna mengantisipasi peninggian aspal jalan yang kian tahun kian bertambah maka dilakukan peninggian site yang 40 centimeter dari permukaan jalan Jalan Muwardi.
2. Posisi bale banjar Sembung Sari yang berada di tengah Site, berpengaruh terhadap sirkulasi dari Kawasan Rusunara, BDK dan Rumah Negara, karena dalam aktivitasnya bale banjar akan digunakan oleh warga yang berada diluar Kawasan Kemenkeu sehingga posisi bale banjar digeser ke area luar dengan sirkulasi yang berbeda dengan Rusunara, BDK dan Rumah Negara agar kegiatan privasi penghuni Rusunara dan Rumah Negara tidak terganggu.

Perencanaan bangunan yang ada di dalam masterplan kompleks keuangan di Renon terdiri dari bangunan – bangunan dengan fungsi Balai Diklat Keuangan, Rumah

Susun Negara (Rusunara), dan Rumah Negara Tapak yaitu:

- Bangunan pura dan wantilan yang berada di sebelah timur laut Kawasan Kemenkeu
- Bangunan masjid yang berada di sebelah utara Kawasan Kemenkeu bersebelahan dengan rusunara
- Bangunan gedung kelas berada di tengah Kawasan Kemenkeu bersebelahan dengan gedung asrama. Gedung kelas terdiri dari 3 lantai.
- Bangunan gedung asrama terletak di tengah Kawasan Kemenkeu, bersebelahan dengan gedung kelas. Gedung Asrama memiliki 2 gedung dan 3 lantai.
- Bangunan kantor yang terletak di depan Kawasan Kemenkeu yang terdiri dari 3 lantai.
- Bangunan gedung rusunara Tower I dan II yang terletak di sebelah barat laut kawasan berupa 2 gedung dengan masing – masing 4 lantai.
- Bangunan gedung rusunara pejabat yang terletak di sebelah barat laut kawasan
- Bangunan rumah negara tapak untuk jabatan Kepala Kanwil yang terletak di depan bangunan rusunara pejabat yang terdiri dari 4 unit rumah.
- Bangunan bale banjar yang terletak di depan site Kawasan Masterplan yang bersebelahan dengan Perumahan Negara dan bale banjar yang terhubung langsung dengan jalan utama Jalan Muwardi.

MASTERPLAN KOMPLEK KAWASAN RENON





Gambar Tampilan Fasad BDK Denpasar

Tahapan Pembangunan Kawasan

Kawasan keuangan di Renon terbagi menjadi 2 bagian besar dengan pemrakarsa masing-masing unit eselon I yaitu:

1. Area Pembangunan Balai Diklat Keuangan (BDK) Denpasar dengan pemrakarsa Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan c.q. BDK Denpasar
2. Area pembangunan hunian pegawai Kementerian Keuangan dengan pemrakarsa Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan meliputi:
 - a. Pembangunan Rusunara dilakukan melalui mekanisme program bantuan pembangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
 - b. Pembangunan rumah negara tapak dan sarana prasarana lingkungan dibangun oleh Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi – Barang Milik Negara (KPTIK-BMN) Denpasar

Pada tahap awal pembangunan yaitu pada tahun 2023 telah dilakukan pekerjaan peninggian elevasi lahan dan

relokasi Bale Banjar Sembung Sari yang dilaksanakan oleh KPTIK-BMN Denpasar. Pekerjaan perancangan pembangunan BDK Denpasar oleh satuan kerja BDK Denpasar dan perancangan Rusunara Tower I dan II oleh satuan kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bali telah dilaksanakan pada tahun 2023. Selanjutnya pekerjaan fisik pembangunan BDK Denpasar dan pembangunan fisik pembangunan Rusunara Tower I dan II dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 ini.

Pada tahun 2024 ini juga ditargetkan untuk penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan Rusunara Tower III (Rusunara Pejabat) antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian PUPR. Selanjutnya pada tahun 2025 direncanakan untuk tahap akhir pembangunan kawasan yang antara lain meliputi pembangunan 4 unit rumah tapak untuk Kakanwil, Tempat Penitipan Anak (TPA), Pembangunan Pagar, dan pembangunan sarana prasarana lingkungan (taman, landscape, jaringan air bersih, air kotor, infrastruktur kabel optic).



Gambar Rencana Tampak Depan Gedung BDK Denpasar

MENGURANGI IMPOR

Untuk Memperkuat Ekonomi Nasional

Ditulis oleh Ima Zanu Setyaningrum

Mulai Dari Diri Sendiri

Baru-baru ini, produk lokal sedang *viral* di beberapa sosial media, salah satunya belanja produk *skincare* lokal di TikTok. Menurut survei TikTok, pengguna TikTok lebih banyak belanja produk lokal saat musim diskon. Fenomena generasi milenial yang terbilang cukup teliti dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Belanja produk dalam negeri merupakan langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kegiatan ini dapat mencegah barang-barang impor membanjiri pasar-pasar lokal di Indonesia. Jika para pengusaha UMKM atau produsen lokal dapat secara terus menerus meningkatkan kualitas produknya, maka cara ini merupakan strategi cerdas untuk menciptakan efek domino positif di berbagai sektor.

Mencintai produk dalam negeri bukan hanya soal memilih produk lokal semata, tetapi juga tentang membangun kemandirian ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan menciptakan kebanggaan nasional. Produsen lokal memberikan peluang pasar ekonomi yang lebih besar, membuka lapangan pekerjaan dan menimbulkan perasaan tenang ketika konsumen membeli produk lokal dengan kualitas yang baik.

Kenapa harus produk dalam negeri?

1. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

Produk dalam negeri dapat meningkatkan pendapatan produsen lokal atau minimal membuka lapangan kerja baru bagi para generasi muda yang mulai kesulitan mendapatkan pekerjaan dari perusahaan bonafid. Hal ini akan dapat memperkuat ekonomi domestik dalam jangka panjang karena dapat mengurangi produk impor dan ketahanan ekonomi.

2. Kualitas yang Tidak Kalah Bersaing

Kualitas produk dalam negeri memiliki kualitas yang cukup baik dan hampir setara dengan produk impor. Bagi yang sering belanja namun menjadi kaum “mendang-mending”, produk lokal adalah pilihan terbaik. Namun

beberapa produk dalam negeri ada juga yang harganya lebih mahal dibandingkan produk impor dengan kualitas yang sama. Oleh karenanya perlu terobosan untuk meningkatkan standar produksi lokal untuk semakin kompetitif di pasar global.

3. Memperkuat nilai tukar rupiah

Transaksi pembelian produk lokal akan lebih stabil dan harga tidak terlalu berpengaruh pada nilai tukar mata uang asing. Hal ini juga akan mengurangi transaksi impor, menaikkan transaksi ekspor, penguatan ekonomi domestik, menarik investor asing, dapat menjaga inflasi tetap rendah. Hal ini merupakan faktor penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Bagaimana Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) skala Nasional?

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menetapkan regulasi pengoptimalan program kerja berupa Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Produk Dalam Negeri adalah Barang/Jasa, termasuk rancang bangun dan perkerajaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Dilanjutkan dengan ketentuan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam instruksi ini, Presiden Joko Widodo mewajibkan setiap K/L/Pemda dan BUMN untuk melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

- Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
- Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor;
- Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan

- Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama;
- Melakukan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan mengupayakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
- Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



Secara umum program P3DN merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan penurunan penggunaan barang impor. Sehingga kedua aspek tersebut harus dilakukan untuk mencapai target capaian realisasi PDN pada masing-masing K/L/Pemda dan BUMN.

Program P3DN Kementerian Keuangan

Berdasarkan dokumen roadmap P3DN Kementerian Keuangan tahun 2022 - 2026, berikut adalah 5 aspek utama yang harus dilaksanakan untuk mencapai target capaian PDN yaitu:



Dari lima aspek utama tersebut, maka perlu ditetapkan peta jalan Program P3DN Kementerian Keuangan selama 5 tahun dari 2022 s.d 2026 sebagai berikut:



Data Impor Barang/Jasa Kementerian Keuangan

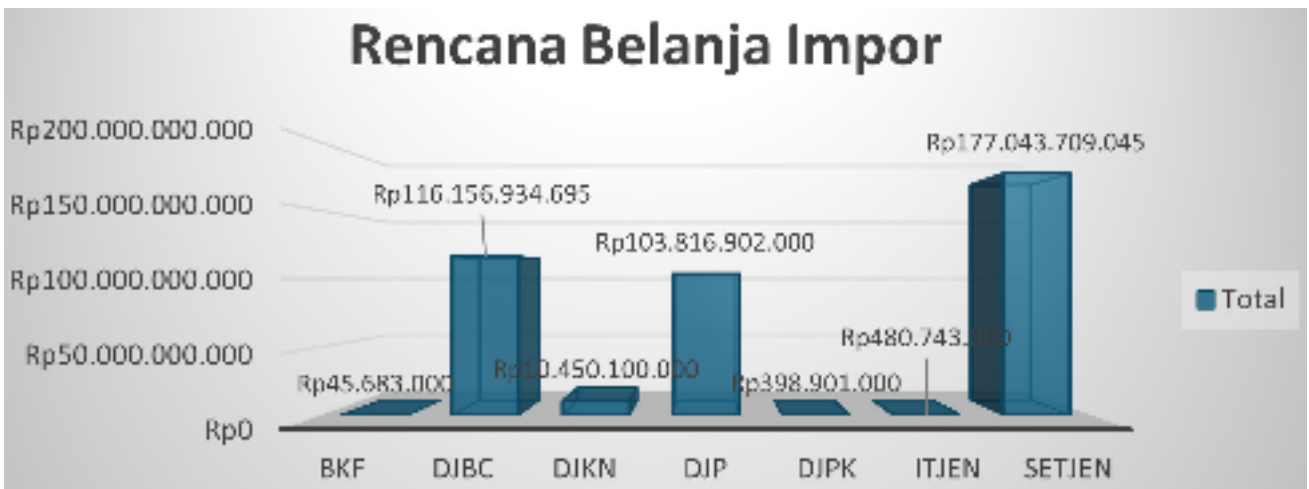
Kementerian Keuangan secara umum telah menggunakan produk dalam negeri dalam belanja pengadaan barang/jasanya. Namun, beberapa barang/jasa yang tidak dapat digantikan dengan produk lokal karena produsen dalam negeri belum mampu memenuhi spesifikasi minimal atau volume tidak dapat memenuhi kebutuhan masih diperbolehkan untuk dilakukan belanja impor.

Berdasarkan roadmap diatas, sub aspek yang cukup menantang adalah substitusi impor. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib mengurangi belanja

impor sampai dengan 5% (lima persen) atau hanya diperbolehkan belanja dengan persentase 5% dari total anggaran belanja pengadaan barang/jasa. Oleh karenanya, substitusi impor di Kementerian Keuangan harus sedang dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Berdasarkan data pada Dashboard PDN di Bigbox LKPP, nilai perencanaan impor pada RUP Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp408.392.972.740 atau kurang lebih sebesar 4% dari total perencanaan RUP untuk Penyedia.

Data per Unit Eselon I yang masih memiliki belanja impor pada aplikasi RUP Tahun Anggaran 2024 pada Bigbox LKPP per 20 Mei 2024 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Grafik tersebut, 3 kategori barang/jasa dan besarnya nilai rencana impor sebagai berikut:



Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ekonomi nasional. Dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dimulai dari diri sendiri akan terjadi peningkatan kualitas produk lokal yang akan menciptakan efek positif yang luas.

Kementerian Keuangan telah menggunakan produk dalam negeri dalam belanja pengadaan barang/jasa dan masih berupaya untuk mengurangi belanja produk impor. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2024, belanja impor Kementerian Keuangan yang masih belum memiliki substitusi impornya antara lain yaitu peralatan IT dan Multimedia, Suku Cadang Kapal Patroli, peralatan laboratorium dan peralatan perlindungan diri.

Jika terus dilakukan upaya-upaya secara sistematis berdasarkan analisis pada lima aspek utama pada dokumen roadmap P3DN Kementerian Keuangan, diharapkan Kementerian Keuangan dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi Indonesia sebagai salah satu 15 K/L anggaran terbesar pemerintah.

Pentingnya Verifikasi Lapangan : Alamat Palsu Pemenang Tender Proyek Konstruksi

Ditulis oleh Yelly Metasari



Foto : Yelly Metasari

Pemerintah merupakan penggerak roda perekonomian nasional. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah memerlukan tatanan organisasi yang baik dan transparan di setiap program yang dibangunnya. Salah satu sektor penting dalam program transparansi pemerintah adalah pelaksanaan sistem e-Procurement sebagai Solusi terkini di dunia pengadaan barang/jasa yang dibentuk sebagai akibat tuntutan dari masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai pengadaan barang/jasa.

Sistem e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa melalui media elektronik antara Kelompok Kerja Pemilihan barang dan Jasa dengan Penyedia Jasa.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa di inginkannya, dengan proses tertentu guna tercapainya kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka pelaku pengadaan harus mengikuti etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dalam dunia pengadaan barang/jasa adalah Alamat palsu yang digunakan oleh penyedia pengadaan barang/jasa. Bahkan terjadi kepada pemenang tender milyaran rupiah dimana alamat nya tidak valid.

Berdasarkan pada data Infografis I, diketahui bahwa Alamat penyedia yang terdaftar di SPSE banyak yang tidak sesuai dengan lokasi kediamannya. Keberadaan kantor tidak sesuai dengan Alamat yang terdaftar. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat kita bahas beberapa hal, seperti apa yang dapat dilakukan untuk mengecek kebenaran Alamat calon pemenang tender, bagaimanakah Batasan dan aturan mengenai klarifikasi atau verifikasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan kepada calon pemenang tender?

Tender dan Proyek

Dalam dunia Pengadaan barang dan jasa, tentu tidak asing dengan istilah tender. Tender adalah pengajuan harga untuk melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan oleh unit pemerintah atau swasta, pekerjaan yang ditawarkan dapat berupa pemborongan pekerjaan, pengadaan barang-barang atau penyediaan jasa dan pembelian barang atau jasa . Tender ditawarkan melalui sistem pelelangan pekerjaan dengan mengundang beberapa perusahaan untuk berpartisipasi mengikuti pelaksanaan proyek untuk mendapatkan satu pemenang yang dapat melaksanakan proyek sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Proyek sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki batas waktu dan alokasi sumber daya yang jelas dan telah ditentukan sebelumnya.

Kriteria mutu dari proyek dirancang secara rinci untuk menghasilkan output yang memuaskan sesuai kesepakatan awal. Definisi lain dari proyek adalah kumpulan dari macam-macam sumber daya manusia, modal atau biaya, peralatan dan material yang membentuk suatu organisasi untuk mewujudkan visi dan misi. Pelelangan Proyek dalam instansi pemerintah tidak selalu dipublikasikan secara terbuka hal ini dikarenakan beberapa proyek pemerintah bersifat rahasia yang menyangkut tentang pertahanan dan keamanan Negara.

DATA KASUS PENYEDIA

PEMENANG TENDER DENGAN ALAMAT PALSU



Dalam pelaksanaan tender tentunya melibatkan aplikasi. Aplikasi yang digunakan saat ini adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Dalam SPSE terdapat subsistem Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan data kualifikasi Pelaku Usaha Barang/Jasa).

Proyek pengadaan pada sektor konstruksi khususnya pada penyelenggaraan perbaikan jalan didominasi oleh suap dalam alokasi anggaran, permintaan *fee* dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, keikutsertaan aparat pemerintah selaku pengurus ikut serta dalam pelaksanaan pemborongan tender dan ijon pekerjaan. Sehingga memudahkan penyedia sebagai pemborong atau pengawas pekerjaan melakukan perbuatan curang. Biasanya tahap perencanaan menjadi sorotan utama.

Alamat Palsu Pemenang Tender

Terkait dengan kesimpulan Alamat palsu pada pemenang tender, Alamat penyedia/pemenang tender yang tercantum dalam LPSE adalah Alamat yang tercantum pada saat penyedia mendaftarkan perusahaannya pada LPSE dan Alamat yang tercantum tersebut sifatnya tidak mengikat. Hal ini disebabkan karena kapanpun penyedia dapat pindah Alamat ke Alamat lain dan belum melakukan update Alamat di SPSE. Alamat pemenang tender pada LPSE tidak wajib sama dengan yang tercantum dalam SBU dan dokumen Perusahaan lainnya.

Perbedaan Alamat yang tercantum pada SPSE dan fakta di lapangan bukanlah merupakan penyimpangan terhadap aturan dalam pengadaan barang/jasa.

Hal ini juga sesuai dengan aturan dalam dokumen pemilihan untuk pengadaan jasa konstruksi, Dimana tidak ada klausul yang menyatakan, bahwa ketika terdapat perbedaan Alamat penawaran penyedia harus digugurkan.

Dalam Dokumen Pemilihan tidak terdapat persyaratan “mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor berupa milik sendiri/sewa”, sehingga Pokja Pemilihan tidak melakukan evaluasi atas hal tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dimana:

1. NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha;
2. NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS, dan merupakan identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha;
3. NIB berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha;
4. NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. NIB dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. NIB mencakup data-data antara lain profil, permodalan usaha, NPWP, KBLI, dan Lokasi Usaha;
7. Data-data pada NIB tersebut telah diverifikasi dan terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diketahui bahwa proses pengajuan NIB, data-data Pelaku Usaha dimana salah satunya adalah lokasi usaha/alamat, sebenarnya telah terintegrasi dan diverifikasi oleh Lembaga OSS melalui Instansi terkait.

Pokja Pemilihan tidak dapat menyatakan data kualifikasi perusahaan tidak berlaku karena hal tersebut adalah kewenangan instansi yang berwenang tersebut. Perbedaan atau perpindahan alamat kantor, tempat usaha, dan/atau operasional tidak menyebabkan data isian kualifikasi menjadi tidak berlaku, alamat peserta tender yang tercantum dalam SPSE adalah alamat yang dicantumkan pada saat mendaftarkan perusahaan pada SPSE sesuai dengan data pada NIB dan alamat tersebut tidak mengikat karena bisa saja perusahaan tersebut pindah alamat atau berpindah tangan kepada pihak lain dan belum melakukan update alamat pada SPSE.

Proses Verifikasi

Bermula dari Pandemi yang menggeser kebiasaan untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi dilakukan secara Daring dan dilanjutkan bila tidak memungkinkan secara luring/tatap muka yang sosialisasinya dilakukan melalui Surat Edaran dari LKPP, saat ini untuk Pembuktian Kualifikasi sudah dibakukan untuk dilakukan secara daring dalam Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 pada Lampiran I halaman 69 dan pada Lampiran III halaman 37 dengan bunyi sebagai berikut, mengenai pembuktian kualifikasi, yaitu:

“Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang. Dalam hal diperlukan atau apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka”.

Pokja Pemilihan dalam proses evaluasi penawaran melakukan verifikasi, pembuktian kualifikasi maupun klarifikasi terhadap Alamat penyedia. Kecuali kualifikasi telah terverifikasi dalam SIKAP. Dalam pelaksanaannya, Pokja Pemilihan dapat melakukan proses verifikasi. Verifikasi artinya pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Selain itu, Pokja Pemilihan dapat juga melakukan

klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek kevalidan Alamat kantor, *workshop*, pabrik, Gudang atau lainnya sebagaimana yang tertera dalam dokumen penawaran penyedia.

Selain Alamat, pokja pemilihan pun mempunyai kewenangan untuk mengecek tenaga kerja/ tenaga ahli/tenaga personal, peralatan yang dicantumkan di dokumen penawaran memenuhi syarat atau tidak. Kemudian mengecek dukungan alat/barang yang perlu diklarifikasi kebenaran dukungan dan produk yang didukung apa sesuai spesifikasi dan jumlah yang ditawarkan Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan pokja pemilihan dalam rangka evaluasi penawaran, kesesuaian antara dokumen dan realisasi atau fakta di lapangan. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh pada hasil evaluasi.

Tahapan Verifikasi dan klarifikasi kualifikasi merupakan salah satu tahapan dalam proses pengadaan barang/jasa. Ini dilakukan agar tidak terjadi manipulasi data dan pemalsuan dokumen. Verifikasi Kualifikasi dilakukan oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan (PP) di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses tender (Karena kualifikasi sudah dilakukan bersama-sama oleh seluruh Pokja dan PP di seluruh Indonesia) untuk memonitoring proses verifikasi kualifikasi oleh penyedia.

Pembuktian, Verifikasi dan Klarifikasi yang dilakukan oleh pokja pemilihan terhadap penyedia dengan cara menyamakan data antara informasi yang tertera di SPSE atau SIKAP dengan dokumen asli pada dokumen penawaran penyedia. Proses ini dapat dilakukan secara online maupun luring atau tatap muka. Apabila data kualifikasi telah terverifikasi dalam SIKAP, sebaiknya pokja pemilihan tetap melakukan verifikasi dan pembuktian untuk meminimalisir pembaharuan data penyedia yang belum diupdate perubahannya pada SPSE dan SIKAP.

Selain itu perlunya optimalisasi pengawasan oleh Lembaga terkait seperti BPK, Kejaksaan, Kepolisian. Pengawasan terhadap pelaksanaan tender yang dimulai dari tahap perencanaan sampai serah terima pekerjaan. Dari sisi regulasi, perlunya penguatan aturan mengenai ijin lokasi, Alamat yang terdaftar dan terverifikasi oleh Lembaga terkait. Waktu keberlakuan dan sanksi yang diberikan kepada penyedia yang tidak melakukan update Alamatnya baik secara legal maupun online di aplikasi terdaftar.

SIMPeL-NG

Terobosan Baru Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Ditulis oleh Rachman Sukri

Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) merupakan sistem yang dibangun untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik dan mengelola basis data hasil pengadaan langsung. SIMPeL yang mulai digagas pembangunannya pada Oktober 2012, diimplementasikan sejak 1 Juni 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 13/PMK.01/2014, kemudian diluncurkan pada 5 November 2014 dan menjadi quick wins pada 6 Januari 2015 merupakan suatu terobosan sistem informasi di bidang pengadaan untuk memperbaiki proses bisnis pengadaan langsung manual melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. Aplikasi SIMPeL ini dapat diakses melalui laman www.simpel.lipse.kemenkeu.go.id. Disamping itu untuk mempertahankan orisinalitas dan keberlangsungan aplikasi SIMPeL, pada 7 Maret 2014, telah dilakukan pencatatan Hak Cipta Aplikasi SIMPeL melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan masa berlaku selama 50 tahun.

Pembangunan aplikasi SIMPeL dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan yang selama ini timbul dalam pengadaan langsung yang dilakukan secara manual, seperti terjadinya ketidaksesuaian prosedur pengadaan, terjadinya potensi Korupsi, Kolusi, Nepotisme, ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data yang menyebabkan pelaporan yang tidak akurat, serta kurangnya pengawasan dalam proses pelaksanaan pengadaan langsung.

Pembangunan aplikasi SIMPeL ini juga bertujuan untuk mendorong pengadaan langsung yang berkualitas, yaitu pengadaan yang berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas, persaingan sehat, efektif, efisien, perolehan barang/jasa yang bermutu baik, serta memberikan dampak/manfaat yang luas.

Selain diimplementasikan di Kementerian Keuangan, aplikasi SIMPeL juga telah diimplementasikan di Kementerian/Lembaga lain melalui kesepakatan kerja sama pemanfaatan aplikasi SIMPeL yang tertuang

dalam *Memorandum of Understanding* (MoU), yaitu dengan Badan Kepegawaian Negara pada 22 Agustus 2016, kemudian dilanjutkan dengan Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 7 Desember 2017. Kerja sama pemanfaatan aplikasi SIMPeL ini berakhir pada Desember 2017 sesuai masa berlaku MoU dan tidak dilakukan perpanjangan lagi. Namun demikian pada 16 Agustus 2023, aplikasi SIMPeL mulai dilirik oleh Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) Universitas Andalas (Unand) melalui pengajuan surat permohonan kerjasama penggunaan aplikasi SIMPeL untuk pengadaan langsung di Universitas Andalas. Surat tersebut telah ditindaklanjuti melalui penandatanganan MoU Payung Kerja Sama antara Kementerian Keuangan dan Universitas Andalas. Proses berikutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Aplikasi SIMPeL.

Selanjutnya setelah hampir memasuki satu dekade, aplikasi SIMPeL dirasakan sudah saatnya untuk diperbarui atau dilakukan *reengineering* melalui pengembangan aplikasi SIMPeL Next Generation (SIMPeL-NG). *Reengineering* tersebut berupa penggantian teknologi, redesain layout aplikasi, penyesuaian proses bisnis aplikasi, penyempurnaan dan pengembangan beberapa fitur, serta penyempurnaan dan pengembangan interkoneksi antar sistem. *Reengineering* ini telah dilakukan mulai Juni 2022 sampai dengan Desember 2023. Selanjutnya pada awal tahun 2024 dilakukan persiapan rilis aplikasi dan migrasi basis data dari SIMPeL lama ke SIMPeL-NG. Rencananya pada minggu ketiga Juni 2024 aplikasi SIMPeL-NG akan dirilis dan menggantikan SIMPeL lama.

Latar Belakang Pengembangan SIMPeL-NG

Pembangunan aplikasi SIMPeL-NG yang akan menggantikan SIMPeL versi sebelumnya dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Teknologi yang digunakan dalam pembangunan SIMPeL sudah terlalu lama (SIMPeL dibangun sejak 2013);
- Memiliki keterbatasan dalam pengembangan sistem karena teknologi yang digunakan SIMPeL saat ini sudah obsolete;
- Perlu dilakukan penyesuaian teknologi untuk meningkatkan keamanan, keandalan, adaptabilitas dan interoperabilitas sistem;
- Perlu penambahan fitur baru untuk penyempurnaan dan mengikuti perkembangan kebutuhan proses bisnis.

RENCANA PENGEMBANGAN KE DEPAN (NEXT FUTURE DEVELOPMENT)

2026

Interkoneksi data kepatuhan pajak Penyedia SIMPeL-NG dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSIMP) Ditjen Pajak.

Interkoneksi lain usaha Penyedia SIMPeL-NG dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS).

2025

Interkoneksi pengalaman penyedia pada aplikasi SIMPeL-NG ke Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) LKPP.

Interkoneksi SIMPeL-NG dengan Modul Manajemen Kontrol SI-UKPBJ.

2024

Interkoneksi fitur pencatatan pembelian SIMPeL-NG dengan modul pembayaran MonSAKTI untuk data bukti pembelian dan kutansi.

Fitur monitoring realisasi transaksi SIMPeL dibandingkan dengan ID RUP yang menggunakan metode pengisian langsung. Fitur monitoring ini tersedia mulai dari role PPK, role monitoring Unit Eselon I, role monitoring Pusat.

Rencana Implementasi dan Masa Transisi SIMPeL-NG

SIMPeL-NG direncanakan akan diimplementasikan pada minggu ketiga Juli 2024 dengan pengaturan pasca migrasi SIMPeL-NG dan peralihan masa transisi sebagai berikut:

- a. Untuk akses aplikasi SIMPeL terdiri dua alamat URL, yaitu:
 - Alamat SIMPeL lama melalui <https://www.simpel.lipse.kemenkeu.go.id> untuk transaksi SIMPeL lama sebelum migrasi ke SIMPeL-NG.
 - Alamat SIMPeL-NG melalui <https://www.simpel.kemenkeu.go.id> untuk transaksi setelah migrasi ke SIMPeL-NG.

- b. Setelah migrasi ke SIMPeL-NG secara default akses SIMPeL-NG akan di-forward/diarahkan ke alamat <https://www.simpel.kemenkeu.go.id>, dan untuk akses ke SIMPeL lama akan disediakan button akses ke SIMPeL lama.
- c. Login Admin Satker, PPK, Pejabat Pengadaan, Penyedia pada SIMPeL-NG menggunakan user SIMPeL lama, tetapi diminta untuk melakukan pembaruan password minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar, kecil, angka dan karakter khusus.
- d. Paket lama pada SIMPeL lama akan dimigrasi ke SIMPeL-NG dan dapat diakses pada menu Paket Lama.
- e. Pada masa transisi, SIMPeL lama masih tetap aktif, namun tombol tambah paket, registrasi admin satker, registrasi penyedia, buat user PPK dan Pejabat Pengadaan dinonaktifkan.
- f. Setelah masa transisi dan migrasi data transaksi dari SIMPeL lama ke SIMPeL-NG selesai, aplikasi SIMPeL lama akan dinonaktifkan.
- g. Latihan SIMPeL-NG akan dijadwalkan secara rutin bekerja sama dengan Unit Eselon I.

Arsitektur Bisnis SIMPeL-NG





Foto : Rodhie Febrian

Pendidikan Unggul di Korea Selatan

Pengalaman Studi dan Tips Beasiswa

Ditulis oleh Rodhie Febrian

Minat pegawai Kementerian Keuangan untuk melanjutkan studi di Korea Selatan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini mencerminkan daya tarik kuat negara tersebut sebagai destinasi pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang mencari kualitas pendidikan yang unggul, teknologi canggih, dan budaya yang dinamis. Dalam artikel ini, saya hendak membagikan pengalaman pribadi dan tips praktis bagi para pemburu beasiswa, khususnya untuk yang ingin melanjutkan studi di Korea Selatan. Pengalaman ini didasarkan pada masa studi saya di Kota Seoul dari September 2022 hingga Desember 2023, melalui program beasiswa Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Korea Selatan telah berkembang menjadi salah satu destinasi pendidikan terkemuka di dunia. Dengan sistem pendidikan yang terkenal berkualitas tinggi dan universitas-universitas terkemuka seperti Seoul National University (SNU), Korea Selatan menawarkan

lingkungan akademik yang kompetitif dan inovatif. Selain itu, negara ini adalah pionir dalam bidang teknologi dan inovasi, memberikan mahasiswa akses ke fasilitas canggih dan penelitian mutakhir. Lingkungan belajar yang aman dan ramah serta keberadaan komunitas internasional yang berkembang membuat Korea Selatan menjadi pilihan yang menarik bagi banyak mahasiswa internasional. Dukungan beasiswa yang melimpah dari pemerintah dan berbagai institusi pendidikan semakin mempermudah para mahasiswa untuk mengejar pendidikan mereka di negeri ginseng ini.

Mengapa Memilih Korea Selatan?

Tidak pernah terbayang atau bermimpi bahwa saya akan melanjutkan studi di Korea Selatan. Sejak awal, tujuan utama saya adalah negara-negara berbahasa Inggris seperti United Kingdom, Australia, dan Amerika Serikat. Setelah mencoba empat kali tanpa hasil, barulah pada percobaan kelima saya berhasil mendapatkan kesempatan untuk belajar di Korea

Selatan. Pilihan ini sebenarnya bermula dari ajakan seorang teman yang sudah lebih dulu kuliah di Korea Selatan dan membagikan pengalamannya yang positif.

Korea Selatan memiliki reputasi akademik yang sangat baik dengan universitas-universitas yang dikenal secara global. Seoul National University (SNU) adalah salah satu kampus terbaik di Korea, bahkan masuk dalam peringkat universitas top dunia. Selain SNU, ada juga Yonsei University dan Korea University yang bersama SNU membentuk grup terkenal yang disebut SKY, tiga universitas paling prestisius di Korea Selatan. Kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh universitas-universitas ini menjadikan Korea Selatan pilihan yang menarik bagi para pelajar internasional yang mencari pendidikan berkualitas tinggi.

Meskipun saya bukan penggemar K-pop, ketertarikan pada drama Korea memainkan peran penting dalam keputusan saya. Drama Korea seperti "SKY Castle" memberikan

gambaran menarik tentang sistem pendidikan dan kehidupan di Korea Selatan. Fakta bahwa saya bersekolah di universitas yang sama dengan Baek Hyun-woo, karakter dalam drama “Queen of Tears,” juga memberikan kebanggaan tersendiri.

Selain itu, Korea Selatan menawarkan berbagai macam beasiswa untuk mahasiswa internasional, termasuk beasiswa dari pemerintah seperti Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Setelah mencoba berkali-kali untuk mendapatkan beasiswa ke negara-negara berbahasa Inggris, saya memutuskan untuk mencoba ke Asia Timur dan akhirnya mendapatkan kesempatan emas ini. Beasiswa ini tidak hanya mencakup biaya kuliah tetapi juga memberikan tunjangan hidup, membuatnya menjadi opsi yang sangat menarik dan terjangkau.

Persiapan Sebelum Berangkat

Langkah pertama dalam persiapan adalah melakukan penelitian mendalam tentang universitas dan program studi yang diinginkan. Saya memilih Seoul National University (SNU) karena reputasinya yang tinggi dan relevansi program yang ditawarkan dengan pekerjaan saya. Program yang saya pilih adalah *Master of Public Administration*, dengan konsentrasi pada *Capacity Building for Sustainable Development Goals*. Saya meneliti kurikulum program studi, profil profesor, dan fasilitas



Foto : Rodhie Febrian

kampus termasuk ketersediaan musholla. Saya bersyukur jurusan ini relevan dengan kebutuhan pemerintah dalam hal *Sustainable Public Procurement*, yang menjadi perhatian utama dalam pekerjaan saya.

Proses aplikasi ke universitas di Korea Selatan umumnya melibatkan beberapa tahapan yang intensif. Tahapan tersebut termasuk persiapan berkas, penulisan esai, wawancara pertama, wawancara kedua, dan penulisan esai secara langsung. Pengalaman saya menunjukkan bahwa persiapan ini membutuhkan kerja keras dan ketekunan. Saya meminta proofread esai berkali-kali, berlatih wawancara hingga 13 kali, dan tidak ragu untuk meminta saran dari senior yang telah lebih dahulu mendapatkan beasiswa. Proses ini sangat melelahkan, tetapi dengan dedikasi dan dukungan dari orang-orang terdekat, akhirnya saya berhasil.

Salah satu tantangan terbesar adalah memutuskan untuk studi di Korea tanpa pernah belajar bahasa Korea sebelumnya. Saya menyadari bahwa meskipun program studi diadakan dalam bahasa Inggris, kehidupan sehari-hari tetap membutuhkan pemahaman dasar bahasa Korea. Untuk mendukung kehidupan di luar kampus, seperti berbelanja dan menggunakan transportasi umum, saya mengikuti kursus bahasa Korea yang disediakan oleh kampus. Selain itu, banyak yayasan dan NGO di Korea yang menawarkan kursus bahasa Korea gratis bagi mahasiswa internasional, yang sangat membantu dalam beradaptasi dengan lingkungan baru.

Proses pengurusan visa dan dokumen penting lainnya menjadi lebih mudah berkat bantuan dari KOICA Indonesia setelah dinyatakan lulus. Mereka memberikan panduan lengkap dan dukungan dalam

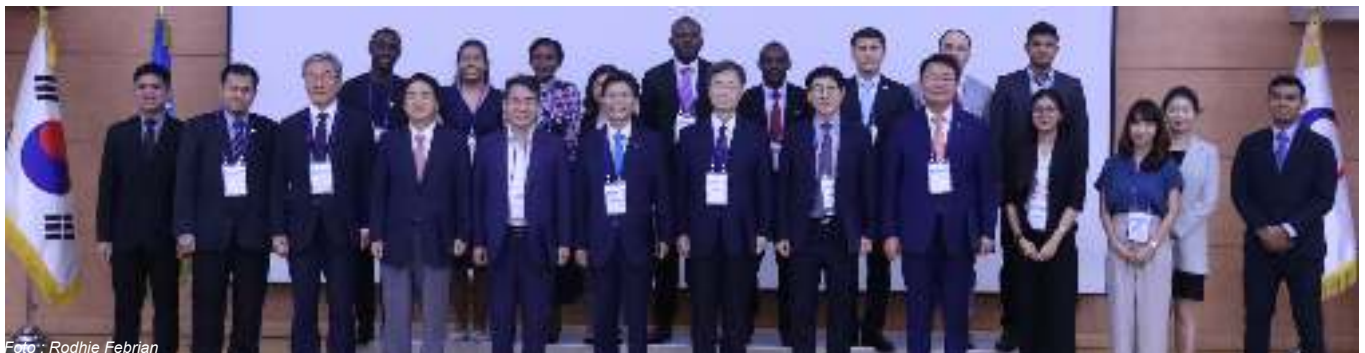


Foto : Rodhie Febrian

mengurus semua persyaratan administrasi. Selain itu, dukungan dari teman-teman seperjuangan di Kementerian Keuangan juga sangat berarti, mengingat ini adalah pengalaman pertama saya keluar negeri. Bantuan mereka memastikan bahwa semua dokumen saya lengkap dan siap tepat waktu, sehingga proses keberangkatan berjalan lancar. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, saya berhasil mengatasi tantangan awal dan siap memulai pengalaman studi di Korea Selatan.

Hari Pertama di Korea Selatan

Hari pertama di Korea Selatan adalah pengalaman yang penuh dengan campuran rasa antusias

dan sedikit kegugupan. Syukurnya, beasiswa KOICA benar-benar menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sejak tiba di bandara, kami sudah dijemput oleh tim KOICA yang ramah. Mereka menyiapkan kendaraan untuk mengantar kami ke asrama yang telah disediakan. Selain itu, layanan *medical check-up* dan seorang manajer yang disebut *sonseongnim* juga sudah disiapkan untuk membantu mengelola kehidupan dan studi kami selama berada di Korea. Hal ini membuat transisi awal kami di Korea menjadi lebih lancar dan terorganisir.

Menghadiri orientasi kampus di Seoul National University memberikan kesan pertama yang sangat positif. Kami disambut dengan terhormat dan

diperkenalkan satu per satu dengan nama instansi kami masing-masing, seperti diplomat yang sedang mengikuti pelatihan. Orientasi ini tidak hanya memperkenalkan kami pada lingkungan kampus yang baru tetapi juga memperkuat semangat kebangsaan karena membawa nama besar Indonesia di forum internasional. KOICA memang menargetkan beasiswanya untuk PNS atau pegawai publik dari negara berkembang, sehingga suasana orientasi pun terasa sangat formal dan penuh makna.

Mengatasi perbedaan budaya di Korea Selatan merupakan tantangan tersendiri. Salah satu aspek budaya yang menonjol adalah konsep *ppali ppali* yang berarti cepat-cepat.



Foto : Rodhie Febrian

Di Korea, segala sesuatu dilakukan dengan cepat dan efisien, mulai dari penyelesaian tugas hingga berjalan kaki. Pada awalnya, saya merasa tergepoh-gepoh untuk mengikuti ritme cepat ini, tetapi lama-kelamaan saya mulai terbiasa. Adaptasi dengan budaya baru ini tidak hanya mengajarkan saya tentang efisiensi tetapi juga memperluas pemahaman saya tentang bagaimana masyarakat Korea menjalani kehidupan sehari-

hari dengan semangat yang tinggi.

Pengalaman Akademik

Pengalaman akademik di Korea Selatan menawarkan perspektif yang unik dan menantang. Salah satu perbedaan utama antara sistem pendidikan di Korea Selatan dan Indonesia adalah durasi program studi. Di Indonesia, program magister umumnya memakan waktu dua tahun, sedangkan program

beasiswa saya di Korea Selatan dipadatkan menjadi 1,5 tahun. Ini termasuk kelas yang diadakan selama liburan musim dingin dan musim panas, yang mempercepat proses belajar namun tetap menjaga kualitas pendidikan.

Metode pengajaran dan pembelajaran di Seoul National University (SNU) sangat intens dan kompetitif. Mahasiswa di

SNU terkenal dengan ambisinya yang tinggi. Para profesor di SNU sebagian besar adalah lulusan dari universitas-universitas top di Amerika Serikat, mencerminkan hubungan dekat antara Korea Selatan dan Amerika. Gaya pengajaran di SNU sangat menuntut, dengan penekanan pada diskusi kritis dan pemahaman mendalam tentang materi. Mahasiswa diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kelas dan proyek kelompok, yang menambah dinamika pembelajaran.

Interaksi dengan dosen dan sesama mahasiswa di SNU sangat profesional. Dosen membuka jadwal konsultasi di kantornya berdasarkan perjanjian, menunjukkan betapa pentingnya manajemen waktu di lingkungan akademik Korea Selatan. Ketepatan waktu sangat dihargai, dan dosen sangat tidak menyukai keterlambatan. Ini mencerminkan budaya masyarakat Korea Selatan yang menghargai efisiensi dan ketepatan waktu. Sebagai mahasiswa internasional, ini menjadi pelajaran penting dalam disiplin waktu dan tanggung jawab akademik.

Secara keseluruhan, pengalaman akademik di Korea Selatan sangat memperkaya, memberikan pandangan baru tentang pendidikan yang lebih intens dan terstruktur.



Foto : Rodhie Febrian

Dengan lingkungan yang kompetitif dan dukungan akademik yang kuat, saya merasa tantangan ini mengasah kemampuan akademik dan profesional saya secara signifikan.

Kehidupan Sehari-hari

Kehidupan sehari-hari di Korea Selatan sebagai mahasiswa internasional penuh dengan tantangan dan pengalaman baru. Salah satu aspek penting adalah mengelola keuangan dengan bijak. Biaya hidup di Korea Selatan, terutama di Seoul, bisa cukup tinggi, sehingga penting untuk membuat anggaran yang ketat. Sebagai mahasiswa, belajar beberapa kalimat dalam bahasa Korea untuk menanyakan diskon bisa sangat membantu. Misalnya, “*kaka juseyo*” (bisakah Anda memberikan diskon?), “*chonon hagsengimnida*”

(saya seorang mahasiswa), dan “*nomu bissayo*” (ini terlalu mahal) adalah beberapa frasa yang berguna.

Transportasi di Korea Selatan sangat efisien dan terhubung dengan baik. Sistem transportasi umum yang mencakup bus, kereta bawah tanah, dan kereta api memungkinkan mobilitas yang mudah dan terjangkau di seluruh negeri. Kartu T-money, sejenis kartu *E-money*, memudahkan perjalanan di berbagai moda transportasi ini. Saya sangat mengapresiasi ketepatan waktu dan keterhubungan transportasi umum di Korea, yang membuat bepergian menjadi sangat nyaman.

Makanan dan kuliner di Korea menawarkan banyak variasi, dan menyesuaikan diri dengan makanan setempat bisa menjadi petualangan



Foto : Rodhie Febrian



Foto : Rodhie Febrian

tersendiri. Sebagai seorang Muslim, mencari makanan halal adalah prioritas. Untungnya, di Seoul terdapat banyak restoran halal, termasuk beberapa restoran Indonesia. Pelajari juga kosakata penting seperti “*dweji gogi issoyo?*” (Apakah ini mengandung daging babi?) untuk memastikan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan aturan diet. Makanan laut dan pilihan vegetarian biasanya menjadi pilihan yang aman.

Mencari masjid dan berinteraksi dengan komunitas Muslim di Korea Selatan juga merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Di Seoul, ada setidaknya tiga masjid utama, dan salah satunya dikelola oleh komunitas Muslim Indonesia. Masjid ini menjadi tempat yang ideal untuk bersosialisasi dan menghabiskan waktu akhir pekan, memberikan rasa kebersamaan dan dukungan spiritual jauh dari rumah. Alih-alih menghabiskan uang untuk hiburan yang mahal seperti konser, saya lebih memilih untuk berkumpul dengan teman-teman di masjid, yang memberikan kedamaian dan kenyamanan.

Membangun Jaringan dan Koneksi

Membangun jaringan dan koneksi adalah bagian penting dari pengalaman studi di luar negeri. Bergabung dengan komunitas mahasiswa internasional dan lokal, termasuk komunitas Muslim,

memberikan banyak manfaat. Saya merasa sangat beruntung bisa ikut serta dalam berbagai kegiatan di luar kelas, seperti kelas taekwondo, komunitas pecinta lingkungan, dan kelompok budaya Korea. Selain itu, saya aktif dalam komunitas Muslim Korea dan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI Seoul, termasuk menyambut tamu negara. Keterlibatan dalam komunitas ini tidak hanya memperluas jaringan sosial saya tetapi juga memperkaya pengalaman budaya saya.

Partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan kesempatan untuk memperluas wawasan dan keterampilan di luar akademik. Berpartisipasi dalam klub dan organisasi mahasiswa, seperti kelompok pecinta lingkungan dan kelas taekwondo, memberikan pengalaman berharga dan memperkuat hubungan dengan sesama mahasiswa dari berbagai latar belakang. Aktivitas-aktivitas ini membantu dalam menciptakan ikatan yang kuat dan membangun persahabatan yang langgeng.

Membangun hubungan profesional selama studi juga sangat penting. Salah satu kebiasaan yang saya pelajari di sini adalah menyiapkan kartu nama. Dalam setiap perkenalan atau acara jaringan, kami saling bertukar kartu nama, yang merupakan cara efektif untuk menjaga hubungan profesional. Pengalaman ini tidak hanya

memperkaya jaringan profesional saya tetapi juga memberikan peluang untuk masa depan. Dengan memiliki banyak teman dan koneksi di Korea dan dari berbagai negara lain, saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan profesional di masa mendatang.

Mengatasi Tantangan

Mengatasi tantangan selama studi di luar negeri adalah bagian penting dari perjalanan akademik. Salah satu kendala utama adalah bahasa. Saya memutuskan untuk belajar bahasa Korea meskipun tidak pernah mempelajarinya sebelumnya. Keluar dari zona nyaman dan belajar bahasa baru memberikan tantangan tersendiri. Orang Korea sangat menghargai upaya kita dalam belajar bahasa mereka, sebagaimana kita menghargai upaya seorang bule yang berbicara bahasa Indonesia meski terbata-bata. Belajar mencintai bahasa dan budaya lokal akan membuat kita dihormati dan diterima dengan baik.

Tekanan akademik juga merupakan tantangan yang harus dihadapi. Belajar di luar negeri tidak mudah, dengan tugas-tugas yang banyak, deadline ketat, presentasi, dan penulisan tesis. Selain itu, ada tekanan untuk mendapatkan nilai bagus dan mencapai target akademik. Dalam menghadapi tekanan ini, saya menemukan dukungan di masjid dan dari teman-teman shalih yang menjadi *support*

system saya di Korea. Keluarga di Indonesia tidak perlu tahu betapa beratnya perjuangan saya. Bagian menangis di perpustakaan tidak akan diunggah di Instagram; yang diunggah hanyalah momen-momen indah.

Kerinduan rumah atau *homesickness* adalah tantangan emosional lainnya. Untuk mengatasinya, saya sering berkumpul dengan sesama pekerja migran dan mahasiswa Indonesia untuk mengadakan acara-acara yang mengobati rasa rindu. Selain itu, makan di restoran Indonesia yang menyediakan bakso, rendang, soto, dan makanan khas lainnya juga membantu mengurangi rasa rindu. Tinggal di Seoul adalah sebuah berkah karena segala fasilitas ada di sana, termasuk komunitas Indonesia yang besar.

Mengatasi tantangan-tantangan ini adalah bagian penting dari pengalaman belajar di Korea Selatan, dan setiap tantangan

memberikan pelajaran berharga yang akan terus berguna di masa depan.

Kesimpulan

Pengalaman studi lanjut di Korea Selatan adalah perjalanan yang penuh suka dan duka. Niat awal saya adalah untuk menimba ilmu dan kembali berkontribusi untuk kemajuan negara. Segala tantangan yang dihadapi, mulai dari kendala bahasa hingga tekanan akademik, telah memberikan pelajaran berharga yang memperkaya wawasan dan pengalaman saya. Berada di lingkungan akademik yang kompetitif seperti Seoul National University, serta beradaptasi dengan budaya dan kehidupan sehari-hari di Korea, telah mengasah keterampilan dan mentalitas saya untuk terus berkembang.

Untuk calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Korea Selatan, khususnya dari kalangan ASN, saya memberikan motivasi untuk

terus berusaha tanpa henti. Jangan membandingkan pencapaian diri dengan orang lain karena setiap orang memiliki jalannya sendiri. Teruslah berlatih, mengajukan aplikasi, dan jangan menyerah ketika mengalami kegagalan. Setiap kali jatuh, bangkitlah lagi dan *apply* lagi. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki masanya untuk bersinar.

Pengalaman ini telah membentuk rencana dan aspirasi masa depan saya. Sebagai seorang muslim, saya selalu mengingat surat Al-Insyirah: setiap datang satu kesulitan, akan ada banyak kemudahan. Indonesia membutuhkan banyak pribadi pembelajar yang mau terus belajar, tidak hanya di bangku sekolah, tetapi juga dari pengalaman sehari-hari. Sederhana seperti berbincang dengan petugas kebersihan atau ahjumma di pasar bisa menjadi sumber ilmu yang berharga. Jangan lupa untuk selalu berdoa, karena Allah adalah sebaik-baik penjaga.



Foto : Rodhie Febrjan



Foto : Yulia Candra Kusumirini

Mari Hidup Sehat: Dengan Gizi Seimbang

Ditulis oleh Gayuh Ardhi Rumpoko

Sobat Pasti, pasti sudah tidak asing dengan slogan 4 Sehat 5 Sempurna, dimana pada masanya slogan ini merepresentasikan pedoman gizi seimbang, Namun, istilah yang telah ada sejak tahun 1952 itu telah berganti menjadi Pedoman Gizi Seimbang (PGS), yang dikeluarkan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2014, Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi masyarakat. Pedoman Gizi Seimbang di Indonesia didasarkan pada 4 Pilar Gizi Seimbang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Peraturan ini.

Tumpeng Gizi Seimbang

PANDUAN KONSUMSI SEHARI-HARI



Mengonsumsi aneka ragam pangan

Mengonsumsi makanan yang bervariasi merupakan salah satu pilar utama pedoman gizi seimbang yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pilar ini menekankan pentingnya pola makan yang beragam untuk menjamin asupan gizi yang cukup dan seimbang. Pilar ini menganjurkan konsumsi makanan yang bervariasi dari masing-masing kelompok makanan utama. Diantaranya adalah nasi atau sumber karbohidrat, lauk pauk sumber protein (daging, ikan, telur, tahu, tempe), sayur mayur, dan buah-buahan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Perhatikan komposisi makanan. Sebagai contoh, nasi merupakan sumber utama kalori, tetapi 'miskin' vitamin dan mineral. Sayuran dan buah-buahan kaya akan vitamin, mineral dan serat, tetapi miskin kalori dan protein. Ikan merupakan sumber utama protein, tetapi sedikit kalori. Nah, jika Sobat Pasti tidak mengombinasikan asupan-asupan tersebut, bukan tidak mungkin Sobat Pasti akan kekurangan gizi, yang pada akhirnya memicu timbulnya penyakit.
- b. Perhatikan konsumsi Protein, karena protein dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi, zat pembangun, bahkan membantu mekanisme pertahanan tubuh. Protein terbagi menjadi dua, yaitu hewani (daging) dan nabati (sayur).
- c. membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Makanan manis berkontribusi pada terjadinya penyakit diabetes melitus, khususnya apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak atau terlalu sering. Makanan asin berkontribusi pada terjadinya penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sedangkan, makanan berlemak dan terlalu berminyak berkontribusi pada terjadinya obesitas atau kegemukan yang berujung pada penyakit jantung.
- d. Buah dan sayur mengandung serat yang baik untuk kesehatan saluran pencernaan. Dengan pencernaan yang sehat, gizi dari makanan akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Dengan makan buah dan sayur secara teratur akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit.
- e. Komposisi makanan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:
 - Membatasi asupan gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan.
 - Mengonsumsi sumber protein seperti ikan, daging, ayam, telur, makanan laut, kacang-kacangan sebanyak 2-4 porsi.
 - Makan sayuran 3-4 porsi.
 - Mengonsumsi buah-buahan 2-3 porsi.
 - Mengonsumsi karbohidrat 3-4 porsi.

- f. Perhatikan label pada kemasan makanan yang Sobat Pasti beli. Pastikan hanya membeli makanan yang mengandung gizi seimbang. Dengan membaca label pada kemasan makanan yang dibeli, Sobat Pasti bisa mengukur masukan kalori dan juga bisa lebih waspada terhadap makanan yang telah kedaluwarsa.
- g. Minum air putih yang cukup (8 gelas sehari). Dengan minum air putih yang cukup setiap hari, Sobat Pasti turut menjaga tubuh untuk terus berfungsi sebagaimana mestinya.
- h. Bersyukur dan nikmati. Nikmati setiap makanan yang masuk ke dalam mulut Sobat Pasti dengan sepenuh hati. Dengan menikmati setiap kunyahan makanan, Sobat Pasti turut mewujudkan cara makan yang baik: dikunyah perlahan dan tidak tergesa-gesa. Alhasil, proses pencernaan makanan bisa berlangsung lebih sempurna sehingga gizi penting dapat diserap sepenuhnya oleh tubuh.

Membiasakan perilaku Hidup Bersih

Pilar berikutnya dalam Pedoman Gizi Seimbang yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah menerapkan pola hidup bersih. Pilar ini menekankan pentingnya kebersihan dan kesehatan sebagai faktor penunjang utama dalam mencapai gizi seimbang.

Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman penyebab penyakit infeksi. Sobat Pasti dianjurkan untuk mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir setiap keluar dari toilet, sebelum menyiapkan makanan, sebelum memasak, dan setelah beraktivitas.

Melakukan aktivitas Fisik

Pilar selanjutnya adalah rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Pilar ini merupakan salah satu cara yang bisa membantu mengatur berat badan. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kesehatan jantung dan sistem kardiovaskular. Namun, olahraga tidak hanya bermanfaat untuk tubuh. Tetapi juga dapat mengurangi stress, meningkatkan mood, dan risiko gangguan kecemasan serta depresi.

Aktivitas fisik yang cukup dibutuhkan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Sobat Pasti dianjurkan untuk berolahraga selama 30 menit dan dilakukan setidaknya 5 kali dalam seminggu. Dengan aktivitas fisik yang cukup, berat badan Sobat Pasti juga akan lebih terjaga di rentang ideal. Dengan ini, Sobat Pasti pun akan terhindar dari risiko obesitas dan beragam penyakit lainnya.

Memantau Berat Badan

Pilar keempat adalah menjaga berat badan ideal. Pilar ini merupakan upaya penting dalam mencapai Gizi Seimbang dan mendorong kesehatan secara menyeluruh. Pilar ini mengacu pada pemahaman akan

berat badan yang sehat dan ideal untuk setiap individu. Karena menjaga berat badan ideal adalah langkah kunci dalam pencegahan obesitas.



10 PESAN Gizi Seimbang

- 1** Syukuri & nikmati aneka ragam makanan
- 2** Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan
- 3** Biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi
- 4** Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok
- 5** Batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak
- 6** Biasakan sarapan
- 7** Biasakan minum air putih yang cukup dan aman
- 8** Biasakan membaca label pada kemasan pangan
- 9** Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir
- 10** Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal



1/2 Piring
Bahan Pokok Pangan

1/2 Piring Lauk-Pauk
• 1/3 ikan • 2/3 daging



ditjen kesmas



@ditjenkesmas



humas kesmas



kesmas.kemkes.go.id



Foto : Yelly Metasari

Candi Borobudur: Perpaduan Kultur Spiritual, Edukasi dan Pariwisata

Ditulis oleh Yelly Metasari

Candi Borobudur adalah monumen bersejarah yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Lokasi Candi Borobudur, yang merupakan warisan dunia, dekat dengan 2 kota besar yaitu Yogyakarta dan Semarang. Sehingga, perjalanan ke tempat ibadah umat Buddha ini tidak memerlukan waktu yang lama. Jaraknya sekitar 40 km dari kota Yogyakarta atau sekitar 1 jam berkendara menggunakan mobil melewati Jl. Magelang, Yogyakarta.

Candi Borobudur diperkirakan didirikan pada abad ke-8 M pada masa Kerajaan Mataram Kuno oleh Raja Samaratungga. Adapun Raja Samaratungga memimpin Mataram Kuno pada tahun 782 – 812 M pada masa pemerintahan Dinasti Syailendra. Pada tahun 1991, Unesco menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia. Selain dikenal sebagai

monumen buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur juga dikenal sebagai candi yang memiliki relief terbanyak di dunia.

Candi Borobudur memiliki relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia dengan 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha. Relief Candi Borobudur menampilkan banyak gambar, termasuk bangsawan, rakyat biasa, pertapa, dan berbagai hewan dan tumbuhan, serta bangunan tradisional Nusantara.

Harga tiket masuk candi Borobudur beragam, terdiri dari tiket plataran dan ke puncak Borobudur. Untuk tiket masuk plataran yaitu:

- wisatawan domestik anak-anak harga tiket Rp25.000
- wisatawan domestik dewasa Rp50.000
- wisatawan mancanegara anak-anak Rp225.000

- wisatawan mancanegara dewasa Rp375.000

Sedangkan, untuk Harga tiket ke puncak Candi Borobudur adalah :

- wisatawan lokal anak-anak Rp75.000
- wisatawan lokal dewasa Rp120.000
- wisatawan mancanegara anak-anak Rp305.000
- wisatawan mancanegara dewasa Rp405.000.

Ketika kita berkunjung di Candi Borobudur dengan wilayah yang sangat luas, maka dari pengelola menyediakan penyewaan stroller, payung bahkan kursi roda untuk manula. Lalu, ada juga penyewaan kereta mobil atau mobil caddy yang digunakan berkeliling candi, biayanya sekitar Rp20.000 - Rp25.000/orang sudah mendapat gratis air mineral.



Foto : Yelly Metasari

Beberapa aturan yang perlu diperhatikan Ketika kita mengunjungi Candi Borobudur:

- a. Perhatikan sikap dan perilaku di lokasi.
- b. Dilarang membuang sampah sembarangan,
- c. Dilarang membuang puntung rokok ke dalam stupa arca atau tidak pada tempatnya
- d. Dilarang memanjat ke atas stupa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa konstruksi batu candi utamanya tetap baik setelah erupsi gunung Merapi yang mengerikan.

Saat ini juga ada batasan jumlah pengunjung yang boleh masuk ke tiga lantai teratas. Ini dilakukan untuk memastikan kelestarian

Candi Borobudur. Disarankan waktu berkunjung yang terbaik adalah ketika pagi hari melihat matahari terbit atau sore hari menikmati senja dengan pemandangan yang sangat mempesona. Karena cuaca di siang hari akan sangat panas.

Candi Borobudur digunakan sebagai wahana spiritual, edukasi, dan pariwisata. Berkeliling mengitari kawasan candi, menapaki tangga demi tangga, mendapat kepuasan tersendiri, apalagi Ketika sampai di puncak candi menatap ke seluruh penjuru menikmati indahny perpaduan yang sempurna antara bangunan budaya dan suasana alam yang harmonis.

Keberadaan Candi Borobudur

sebagai tempat spiritual bagi umat Buddha tentunya juga menjadi wahana edukasi bagi wisatawan, sehingga antara religiusitas, edukasi, dan komoditas menjadi satu kesatuan dalam pelestarian candi Borobudur.

Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia, sudah selayaknya kita jaga Bersama. Candi Borobudur masih menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan baik lokal maupun internasional. Bangunan Dinasti Syailendra ini memiliki sejarah yang panjang dan memiliki pemandangan yang indah. *Workaholiday* hendaknya merencanakan untuk melakukan liburan ke Candi Borobudur.



Foto : Yelly Metasari



Foto : Dwi Komalasari/Pulau Menjangan dan Tabuhan

Meromantisasi Pesona Jawa Timur : Sebagai Wisata Untuk *Healing*

Ditulis oleh Dwi Komalasari

Sobat milenial dan Gen Z pasti sudah sangat familiar dengan istilah *healing*. Penggunaan kata "*healing*" di media sosial memiliki beragam konteks, namun pada intinya masih terkait dengan arti aslinya yaitu proses penyembuhan. Namun sebagian orang memahami arti kata *healing* sebagai aktivitas berlibur, berwisata, atau meninggalkan rutinitas untuk sementara waktu. Aktivitas sehari-hari para pekerja yang rutin dan monoton tentunya membuat pikiran jenuh dan membutuhkan *refreshing* guna *re-charge* energi untuk kembali bekerja.

Beberapa orang mungkin memilih aktivitas menonton konser, menikmati hidangan lezat di restoran, berbelanja, perawatan tubuh, dan lain-lain. Bagi sebagian besar orang utamanya yang menyukai alam, mereka memilih berlibur ke tempat-tempat wisata yang tentunya menyuguhkan pemandangan alam yang indah dan menenangkan mata. Indonesia memiliki banyak sekali tempat wisata indah yang sangat direkomendasikan untuk dikunjungi. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali tempat wisata yang cocok untuk dikunjungi bersama pasangan, keluarga, teman, ataupun *solo traveling*.



Foto : Dwi Komalasari



Foto : Dwi Komalasari

Gunung Bromo

Siapa sih yang tidak tahu Bromo? Pesonanya sudah tidak diragukan lagi di level nasional maupun mancanegara. Dalam *The World's Most Beautiful National Parks 2023* versi Bounce, situs perjalanan wisata yang berbasis di Amerika Serikat, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dinobatkan sebagai taman nasional terindah ketiga di dunia pada tahun 2023. Prestasi yang sungguh membanggakan tentunya dan wajib kita syukuri sebagai bangsa Indonesia, bahwa kita diberikan wisata alam yang sungguh cantik dan diakui dunia.

Kawasan TNBTS terdiri dari ekosistem gurun yaitu lautan pasir dan juga padang savana yang merupakan hamparan padang rumput atau yang dikenal sebagai Bukit Teletubbies. Masih ingat tragedi *flare* foto *pre-wedding* yang mengakibatkan Bukit Teletubbies terbakar? Api yang membakar lahan puluhan hektar itu merusak habitat flora maupun fauna penghuni TNBTS. Sangat disayangkan karena kecerobohan manusia, alam yang begitu indah menjadi rusak. Oleh karena itu, jangan lupa selalu mematuhi aturan yang berlaku di manapun kalian berada agar tidak merugikan siapapun.



Foto : Dwi Komalasari



Foto : Dwi Komalasari

Selain pemandangan padang pasir dan padang rumput yang bisa dinikmati, jangan sampai melewatkan menyaksikan sunrise di Bromo yang sangat indah. Sunrise Bromo ini dapat dinikmati dari beberapa spot, di antaranya Penanjakan 1, Seruni Point, Bukit Cinta, Bukit Mentigen, Bukit Kingkong, dan Pos Dingklik. Untuk memudahkan dalam menikmati pemandangan selama di Bromo, kalian bisa memanfaatkan paket tour Bromo di mana fasilitas yang ditawarkan cukup menarik dengan harga yang bervariasi disesuaikan budget masing-masing. Biasanya fasilitas sudah meliputi penjemputan dan pengantaran menggunakan jeep, biaya tiket masuk, snack dan dokumentasi selama di Bromo. Nah, sangat menarik bukan? Jadi kapan kalian ke Bromo?



Foto : Dwi Komalasari

Kawah Ijen

Mengutip dari laman Wikipedia pada 10 April 2024, Kawah Ijen adalah sebuah danau kawah yang bersifat asam yang berada di puncak Gunung Ijen dengan kedalaman danau 200 meter dan luas kawah mencapai 5.466 hektar. Danau kawah Ijen dikenal merupakan danau air asam kuat terbesar di dunia. Kawah Ijen berada dalam wilayah Cagar Alam Taman Wisata Ijen Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Fenomena yang menarik dan memiliki keunikan sendiri yang ada di Kawah Ijen adalah adanya *Blue Fire*.

Blue fire ini hanya dapat dilihat oleh mata manusia saat tidak ada cahaya. Waktu ideal untuk melihatnya yaitu pada pukul 2 hingga 4 dini hari. Untuk mencapai lokasi *Blue Fire* ini kalian harus melakukan pendakian kurang lebih sekitar 2 jam dengan jalur yang bisa dikategorikan lumayan berat bagi orang yang tidak biasa melakukan pendakian.

Jalur pendakian berupa jalan aspal pegunungan, bebatuan dan berpasir. Oleh karena itu, harus dipastikan kalian dalam kondisi *fit* dan memakai sepatu serta *outfit* yang sesuai. Untuk kalian yang tidak kuat mendaki namun tetap ingin melihat keindahan Kawah Ijen, kalian bisa memanfaatkan jasa gerobak atau trolley yang akan membawa kalian sampai ke atas. Sesampainya di atas, kalian akan disuguhkan pemandangan pegunungan dan kawah yang menakjubkan selepas melakukan pendakian yang melelahkan. Selain itu kita akan melihat lalu lalang penduduk lokal yang membawa bebarang hasil menambang di Kawah Ijen.

Pulau Menjangan dan Tabuhan

Objek wisata yang satu ini cocok untuk kalian yang menyukai keindahan pantai dan surga bawah laut. Pulau Menjangan merupakan pulau kecil yang terletak di 5 mil barat laut pulau Bali dan merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat. “Menjangan” dalam bahasa setempat berarti rusa/kijang dikarenakan pulau ini dihuni kawanan rusa atau kijang liar. Sedangkan Pulau Tabuhan terletak di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Pulau Tabuhan merupakan pulau kecil di perairan Selat Bali.

Mengutip dari laman Wikipedia, 15 Januari 2024, secara harfiah kata “Tabuhan” berasal dari bahasa Suku Using/Osing yang memiliki arti musik atau tetabuhan. Konon, bunyi-bunyian itu akibat dari tiupan angin yang cukup kencang dan berisik di daerah tersebut. Di kedua pulau ini kita dapat menikmati indahnya hamparan pasir putih, air laut yang berwarna biru dan jernih. Aktivitas yang tidak boleh dilewatkan adalah *snorkeling* dan *diving*. Wisatawan dapat berenang sambil menikmati keindahan alam bawah laut. Kalian tidak perlu khawatir karena biasanya untuk paket wisata Pulau Menjangan dan Tabuhan sudah disediakan alat *snorkeling*.

Untuk kalian yang kurang yakin untuk *snorkeling* maupun *diving*, kalian bisa menikmati pinggiran pantai yang indah karena ombaknya cukup tenang. Jangan pula melewatkan untuk mendokumentasikan pemandangan pantai yang sangat menawan bersama pasangan, teman, saudara, ataupun keluarga.

Yang berencana untuk liburan, selain persiapan fisik dan budget, jangan lupa siapkan *itinerary* dan peralatan dokumentasi ya agar liburanmu semakin mengesankan. Selamat *healing* !



Foto : Dwi Komalasari



Foto : Dwi Komalasari



Foto : Dwi Komalasari

info Pasti

MEDIA INFORMASI PENGADAAN DAN ASET TERKINI

